

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

Ketika kita akan mengukur kinerja suatu pemerintah daerah hendaknya beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukan pengolahan data maupun analisis, beberapa hal tersebut antara lain:

- a. Input (alat ukur output), input ini bisa diartikan sebagai pengukuran sumber daya yang ada pada pemerintah dalam proses penyediaan kebutuhan jasa atau pelayanan.
- b. Output (hasil dari pengukuran input), digunakan untuk mengukur seberapa banyaknya jasa atau pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah.
- c. Efisiensi (perbandingan antara input dan output), biasa diartikan sebagai pengukuran atas jumlah sumber daya atau pelayanan yang dibutuhkan dalam satuan hasil tertentu.
- d. Informasi Penjelas (kesesuaian data), maksudnya ketepatan data yang digunakan terhadap pelayanan dari kinerja itu sendiri.

Pengukuran kinerja dari pemerintah merupakan salah satu cara untuk melihat kondisi bagaimana masyarakat dalam menikmati pelayanan yang diberikan pemerintah. Menurut Halim (2007) menjelaskan bahwa pengukuran kemandirian keuangan daerah melalui analisis APBD, pengukuran efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan belanja daerah dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah.

## 1. Efisiensi

Efisiensi ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam mengetahui tingkat efektivitas tertentu. Bisa diartikan bahwa efisiensi adalah hubungan antara pemakaian sumber daya terhadap target sasaran. Indikator yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi ialah penggunaan pemakaian dari sumber tersebut dalam melaksanakan target sasaran yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya diukur melalui penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumber daya lainnya (Ramdhani, 2017).

Keuangan pemerintah suatu daerah bisa kita ukur melalui tingkat efisien dari kinerja. Adapun pengukurannya bisa dilakukan dengan melihat dana yang sudah direalisasikan terhadap dana anggaran. Untuk penghitungan efisiensi dari kebijakan fiskal tersebut yaitu:

$$\text{Efisiensi kinerja fiskal} = \frac{\Sigma \text{Output}}{\Sigma \text{Input}}$$

Menurut H. Emerson Efisiensi merupakan perbandingan antara pemasukan (Input) dan Keuntungan yang didapatkan dengan sumber-sumber yang digunakan (Output). Dalam sudut pandang ekonomi islam pada dasarnya konsep efisiensi yaitu untuk menghindarkan dari segala bentuk pemborosan yang mana terkandung dalam surat Al-Israa' ayat 26-27:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا  
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membelanjakan harta harus dilakukan secara efektif dan efisien, karena itu akan menghindarkan kita dari suatu hal yang tidak berguna (Mubadzir). Apabila kita membelanjakan seluruh harta untuk hal benar, maka itu tidak dikategorikan sebagai mubadzir. Akan tetapi jika kita membelanjakan seluruh harta untuk hal yang tidak benar, maka itu termasuk mubadzir (Hamka 2007). Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari efisiensi itu sendiri ialah untuk menghindari dari sifat pemborosan dan memberikan kesejahteraan untuk daerah tersebut.

## **2. Maqashid Syariah**

Dalam pengertian secara bahasa Maqashid Syariah terdiri dari kata Maqashid (jamak dari Maqsad) dan Syariah. Maqsad merupakan tujuan, sedangkan syariah merupakan jalan menuju pokok kehidupan artinya sebuah jalan yang ditetapkan Allah SWT agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa maqashid syariah merupakan tujuan yang ditentukan oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia. Penjelasan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 15-16 yang artinya “bahwa Allah SWT memberikan cahaya kepadamu dan kitab yang menerangkannya. Dengan kitab itu Allah SWT akan memberikan jalan keselamatan dan mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang atas izinnya dan memimpin mereka ke jalan yang benar”.

As-Syarthibiy membagi maqashid menjadi 3 yaitu maqashid dlaruriyah, maqashid hajjiyyah, dan maqashid tahsiniyyah. Maqashid dlaruriyah bertujuan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan (kebutuhan wajib). Kelima unsur pokok tersebut meliputi: hifdh al-din, hifzh an-nafs, hifzh al-aql, hifzh an-nasb, dan hifzh al-mal. Sedangkan maqashid hajjiyyah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memelihara dari lima unsur pokok tersebut agar menjadi lebih baik (kebutuhan untuk meringankan beban). Dan terkahir maqashid tahsiniyat ditujukan sebagai penyempurna dari kelima unsur pokok tersebut (kebutuhan pelengkap).

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU N0. 12 tahun 2008, PAD ialah semua penerimaan pendapatan yang diterima daerah baik dari pengelolaannya sendiri atau dari penerimaan lainnya. Sumber keuangan yang dikelola sendiri tersebut diantaranya penerimaan yang berasal dari hasil penarikan pajak atau retribusi dan pengelolaan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan agar daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi sendiri (Halim, 2014)

Pelaksanaan kebijakan fiskal suatu daerah disarankan dapat memperbaiki atau menambah PAD yang dimiliki dengan menggali sumber-sumber kekayaan yang dimiliki, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerahnya sendiri. Sehingga, mampu meminimalisir dalam mempergantungkan bantuan pendanaan yang diberikan dari pemerintah pusat.

Selain itu, PAD dijadikan alat ukur untuk mengetahui kemandirian daerah, apakah daerah itu sudah mandiri dalam mengurus daerahnya atau belum. Menurut Susanti (2016) daerah yang dikatakan mandiri apabila PAD yang didapatkan juga ikut meningkat dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penelitiannya yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap TKKD atau tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Adapun cara menghitung PAD ialah:

$$\text{PAD} = \text{Total Penerimaan ( Pajak + Retribusi + Kekayaan Daerah + Pendapatan Lain yang Sah)}$$

Dalam memaksimalkan peningkatan PAD dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, sehingga akan terbentuk kesejahteraan daerah.

#### 4. Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 didalam susunan APBD terdapat pemasukan pendapatan, biaya belanja, serta biaya pembiayaan disamping itu di APBD juga dituliskan jumlah biaya anggaran dan biaya realisasi yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pembagian belanja daerah terbagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan belanja lainnya. Sedangkan belanja langsung daerah terdiri dari belanja untuk pegawai, barang atau jasa, dan modal. Sedangkan dalam peraturan Permendagri Nomor. 13 tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja untuk modal ialah belanja yang di dipakai untuk

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah bisa berbentuk lahan, alat-alat mesin, gedung bangunan, jalan, saluran irigasi, jaringan, dan aset yang lain.

Menurut penelitian Sasana (2012) belanja daerah yang dirasa kurang menempel langsung kepada masyarakat ialah belanja dari tidak langsung. Namun, dengan pengalokasian belanja tidak langsung kepada pegawai dengan tepat, maka akan meningkatkan pelayanan kepada publik. Ketika pelayanannya baik maka bisa membentuk investasi yang bagus juga, sehingga menjadi baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **5. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Halim (2002) DAK merupakan dana yang sifatnya sangat khusus, maksudnya dana itu digunakan berdasarkan arahan dari pemerintah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Tujuan dari DAK adalah pemberian dana dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membantu meringankan dalam menyediakan sarana maupun prasarana dalam rangka memperbaiki dan mempercepat dalam pembangunan daerah, sehingga akan membentuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Sedangkan menurut UU No. 104 tahun 2000 tujuan DAK ialah untuk pengadaan investasi dalam rangka memperbaiki sarana maupun prasarana dalam bentuk fisik dengan umur yang panjang. DAK juga digunakan untuk memperbaiki dari sarana dan prasarana tersebut dalam jangka waktu terbatas (kurang dari tiga tahun).

Dalam menentukan penerima daerah yang mendapatkan DAK ada tiga formula perhitungan yang digunakan antara lain kriteria umum, khusus, dan teknis. Pada kriteria umum daerah yang mendapatkan DAK ialah daerah yang memiliki kriteria umum kurang dari rata-rata kriteria umum daerah secara nasional. Sedangkan pada kriteria khusus dengan melihat keadaan dari wilayah daerahnya diantaranya melihat pada potensi yang dimiliki, ketahanan pangannya, serta melihat letak daerahnya apakah daerahnya tertinggal dan rawan bencana. Kemudian pada kriteria yang ketiga ialah kriteria teknis. Kriteria ini ditentukan dari departemennya sendiri misalnya dengan melihat keadaan infrastrukturnya, apakah masih baik atau tidak. Sehingga dalam perolehan DAK dari pemerintah pusat bisa dihitung dengan rumus (Usman et al, 2008):

**Bobot DAK = Bobot Daerah (Indeks fiskal wilayah x indeks kemahalan konstruksi) + Bobot Teknis (Indeks Teknis x Kemahalan Konstruksi).**

#### 6. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah agar mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri dalam menjalankan desentralisasi.

Distribusi DAU yang diberikan kepada daerah-daerah tergantung dari kemampuan keuangannya. Apabila daerah memiliki kemampuan keuangan relatif besar maka distribusi DAU yang diberikan lebih kecil, dan sebaliknya

apabila daerah memiliki kemampuan keuangan relatif kecil maka akan memperoleh DAU yang relatif besar (Sidik, 2004).

Sehingga dalam pengalokasian DAU per kabupaten/kota dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot DAU} = \frac{\text{DAU yang dibutuhkan}}{\text{Total yang dibutuhkan}}$$

## 7. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ekonomi masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan tersebut diketahui melalui kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan pokoknya baik kebutuhan primer, tersier, maupun sekunder. Menurut Hartomo dan Aziz (1997) Penyebab kemiskinan karena adanya faktor penyebabnya, diantaranya rendahnya pendidikan, lapangan pekerjaan yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya alam dan modal, serta adanya beban keluarga. Sedangkan menurut Nurkse kemiskinan berawal dari teori lingkaran kemiskinan setan (*Vicious circle of poverty*) (Kuncoro, 2010)

Penduduk miskin merupakan keadaan penduduk yang dilihat dari pengeluaran perkapitanya, yaitu apabila pengeluaran perkapitanya berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tersebut dapat diketahui dengan melihat total dari garis kemiskinan makanan (*Food*) yang disetarakan dengan pengeluaran sebanyak 2100 kilokalori maupun non makanan (*Non food*) seperti kebutuhan sekolah, kesehatan, maupun papan sandang. Untuk menghitung presentase dari penduduk yang miskin ialah:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z-y_i}{i} \right)^{\alpha}$$

$$\alpha = 0$$

$z$  = Garis Kemiskinan (GK)

$y = \bar{x}$  Pengeluaran Perkapita yang berada dibawah GK

$q = \sum$  penduduk dibawah GK

$n = \sum$  penduduk

## 8. Kemiskinan Dalam Islam

Menurut Fisabilillah (2013) kemiskinan diartikan sebagai gambaran seseorang yang memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam islam sendiri juga dijelaskan mengenai cara mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam islam kekayaan itu suatu kenikmatan karunia Allah yang harus disyukuri. Kemiskinan itu suatu ujian, cobaan, bahkan suatu bencana yang mampu memberikan pertolongan hanyalah Allah SWT (Qardawy: 1996).

Semua permasalahan yang kita alami baik dilingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara pasti ada faktor penyebabnya, seperti halnya kemiskinan. Didalam Al-quran juga sudah dijelaskan bahwa kemiskinan disebabkan beberapa penyebab diantaranya Keterbatasan untuk berusaha (Q.s Al Baqarah: 273) dan sebagai sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah SWT agar kita menjadi lebih bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah (Q.s Al-An'am: 42).

Menurut Wuri (2013) Islam mempunyai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi sesuai dengan syariat islam sehingga nantinya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi

semua umat bahkan juga akan mendorong untuk membuat rancangan anggaran yang ditujukan untuk kemaslahatan dan keperluan umat manusia. Selain itu, islam juga mendorong infrastruktur, mendorong penyediaan pelayanan publik, dan mendorong kebijakan untuk pemerataan.

## **9. Jumlah Penduduk**

Menurut BPS dikatakan sebagai penduduk ialah ketika seseorang itu sudah menetapi wilayah (Indonesia) kurang lebih sekitar enam bulan atau mereka yang menetap di wilayah tersebut belum sampai enam bulan, akan tetapi bertujuan ingin menetap di wilayah tersebut.

Sedangkan menurut Teory Keynesian bahwa tambahnya jumlah penduduk tidak hanya bertambahnya dari jumlah penduduknya, melainkan akan memberikan pengaruh terhadap bertambahnya daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat meningkat maka akan meningkatkan juga produktivitas tenaga kerjanya. Pandangan dari teori solow Pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan dengan SDM, teknologi yang canggih dan hasil yang didapatkan. Menurut solow penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif (Pujoalwanto, 2014). Sehingga, bisa kita katakan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya memberikan dampak yang negatif misalnya pengangguran dan kemiskinan akan tetapi bisa memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya meningkatnya produktivitas tenaga kerja karena daya beli masyarakat yang semakin bertambah.

## 10. Pendidikan

Dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003, bahwa pendidikan merupakan suatu kesadaran pada diri seseorang untuk menumbuhkan semangat diri dalam belajar, sehingga akan terbentuk kekuatan tersendiri pada dirinya seperti spiritual, mampu mengendalikan diri, dan memiliki kepribadian yang cerdas dan berakhlak mulia. Salah satu tujuan pendidikan ialah menciptakan sifat optimisme dan menjadi hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Dalam pembangunan ekonomi pendidikan sangat diperlukan, karena memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mendorong produktivitas dan kegiatan ekonomi yang lain. Sehingga, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai. Pada kenyataannya dapat dilihat bahwa dengan ketrampilan dan pengetahuan dapat menumbuhkan dan melaksanakan investasi pendidikan dalam rangka menambah sumber daya manusia. Sehingga pendidikan memiliki dampak terhadap kemiskinan yaitu ketika bertambahnya penduduk yang berpendidikan semakin meningkat artinya produktivitas kerja seseorang juga meningkat, sehingga akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Keadaan pendidikan daerah itu baik atau tidak bisa diketahui dengan melihat rata-rata dari lama sekolahnya, kemudian Angka melek hurufnya, dan rata-rata tingkat partisipasi sekolah daerah itu. Dari ketiga tersebut kita bisa menggunakan RLS untuk menghitungnya, yaitu:

$$RLS = \frac{1}{p_{15}} \sum_{i=1}^{p_{15+}} (\text{lamanya sekolah pada penduduk ke } - i)$$

penjelasan:

$p_{15+} = \sum$  penduduk yang berusia diatas 15 tahun

## 11. PDRB

Menurut (BPS) PDRB adalah nilai total akhir dari suatu unit usaha baik barang atau jasa yang dikerjakan di dalam suatu wilayah, atau nilai tambah dari unit usaha. PDRB ini digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam mengolah sumber dayanya.

Menurut Wongdesmiwati (2009) menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat teratasi dengan PDB riil, serta faktor yang lain misalnya investasi, munculnya teknologi yang baru, dan meningkatnya sumber daya modal. Sehingga bisa dikatakan PDRB ini memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan artinya ketika PDRB ini meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan.

Dalam perhitungan PDRB terdapat dua macam harga yang digunakan diantaranya atas dasar harga konstan yaitu harga yang dihitung berdasarkan atas harga tetap pada tahun dasar dan harga berlaku yang dihitung dengan harga pada tahun sekarang.

Selain itu dalam perhitungan PDRB ada tiga macam pendekatan yang dipakai antara lain:

1. Pendekatan produksi, yaitu nilai tambah barang pada periode tertentu , biasanya satu tahun.

2. Pendekatan pengeluaran, yaitu semua total pengeluaran wilayah pada jangka waktu tertentu.
3. Pendekatan pendapatan, yaitu seluruh penghasilan dari jasa faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi suatu barang.

## B. Telaah Pustaka

Pada bagian penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan mengenai rujukan atau referensi yang digunakan penulis dalam menyusun penelitiannya. Tujuan dari bagian ini ialah untuk mengetahui perbedaan antara kerangka teori yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama penulis, sehingga penulis bisa menambahkan bagian yg belum ada pada penelitian dahulu. Berikut ini ada beberapa penelitian yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan Islami, (2018) yang berjudul “Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015”. Penelitiannya dengan pendekatan *Stochastic Frontier Approach* (SFA). Pengukuran kinerja kebijakan fiskal yang dilakukan menggunakan PAD, DAK, Belanja Daerah (langsung dan tidak langsung) sebagai variabel *input* . Kemudian variabel *output* berupa kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan bahwa kabupaten/kota di daerah tersebut rata-rata kinerja fiskalnya belum mengalami efisiensi secara baik. Secara parsial variabel yang berpengaruh positif yaitu jumlah penduduk. Kemudian untuk variabel yang berpengaruh negatif ialah PDRB. Sedangkan variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh.

Penelitian lain dilakukan oleh Syauqi, dkk (2017) tentang “Strategi Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Bogor dalam Pengelolaan APBD”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchi Process* (AHP). Variabel dependennya yaitu Kinerja keuangan daerah. Sedangkan variabel independennya berupa investasi, PDRB, dan pajak daerah. Penelitian ini mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor pada tahun 2005-2014 tidak stabil atau belum baik. Yang mana variabel investasi, pendapatan perkapita, dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel PDRB signifikan berpengaruh negatif.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Syamsudin, dkk (2015) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan”. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel independennya berupa kinerja keuangan berupa rasio keuangan, kemandirian, dan efisiensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio yang tidak berpengaruh ialah rasio efektifitas dan efisiensi. Sedangkan rasio yang memiliki pengaruh secara positif ialah rasio kemandirian artinya ketika tingginya PAD kabupaten/kota di kawasan Solo Raya maka daerah tersebut akan semakin mandiri.

Penelitian lain dilakukan oleh Heryanti, dkk (2019) dengan judul “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah rasio derajat desentralisasi fiskal (RDDF) sedangkan variabel independen yang digunakan adalah PAD, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi. Alat analisisnya menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah dan signifikan, sedangkan dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Lisna, dkk (2013) yang berjudul “Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan”. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, DBH, DAU, tingkat kemiskinan. Penelitian ini memberikan beberapa model persamaan simultan dinamis yang dibangun dapat disimpulkan bahwa studi ini ingin membuktikan bahwa kebijakan kapasitas fiskal daerah akan berdampak terhadap percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dibandingkan kebijakan transfer fiskal. Dari hasil itu diperoleh bahwa DAU tidak memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan itu diduga adanya fenomena *fly paper effect*. Sedangkan kebijakan fiskal daerah dari pajak dan DBH mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dibandingkan kebijakan transfer fiskal.

Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Hermawan dan Ananda (2013) yang berjudul “Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Publik (Studi Kasus: 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2006-2010)”. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa *Data Envelopment Analysis*.

Variabel input yang digunakan adalah kesehatan, pendidikan, distribusi, stabilitas dan kinerja ekonomi, sedangkan variabel output yang digunakan adalah skor efisiensi penyebaran dari alokasi anggaran. Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan atas efisiensi alokasi anggaran pemerintah sektor publik yang didominasi daerah perkotaan yaitu Surabaya, Malang, dan Batu. Di daerah tersebut APBD bidang kesehatan dan pendidikan memperoleh skor efisiensi relatif tinggi, sedangkan di daerah lainnya masih perlu perhatian khusus karena rendahnya efisiensi kinerja sosial.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Manik (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau”. Variabel pada penelitian ini menggunakan data belanja kinerja keuangan daerah, sedangkan variabel independennya berupa data belanja modal, dana perimbangan, dan PAD. Hasil dari penelitian ini menjelaskan secara keseluruhan bahwa variabel belanja modal, PAD, dan dana perimbangan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap variabel kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tohar dan Zakhiya (2011) dengan judul “Pengaruh PAD dan DAU terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel dependennya menggunakan PAD dan DAU, sedangkan variabel independennya menggunakan kemandirian daerah yang diukur melalui tingkat rasio kemandirian dan pertumbuhan ekonomi PDRB.

Hasil dari penelitian ini variabel yang memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian daerah ialah PAD, Sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kemandirian keuangan. Akan tetapi ketiga variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penelitian lain dilakukan oleh Dautyan (2014) dengan judul “Interrelation Among Economic Growth, Income Inequality and Fiscal Performance: Evidence from Anglo Saxon Countries”. Penelitian ini menggunakan metodologi VAR Struktural. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Kinerja Fiskal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketimpangan memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kasus Inggris dan memberikan efek positif dalam kasus Amerika Serikat dan Kanada. Peningkatan ketimpangan pendapatan memperburuk kinerja fiskal untuk semua negara.

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Zakaria (2013) yang berjudul “The Impact of Fiscal Decentralization Toward Regional Inequalities in Eastern Region of Indonesia”. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan regresi berganda. Penelitian Zakaria memakai variabel independen berupa pertumbuhan populasi, pendidikan, tingkat partisipasi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat investasi, Sedangkan variabel dependennya adalah Ketidaksetaraan wilayah. Hasil analisis yang didapatkan adalah Desentralisasi fiskal tidak bisa menurunkan tingkat ketimpangan regional di Indonesia bagian

timur. Pertumbuhan populasi dan tingkat pengangguran terbuka memang berpengaruh pada peningkatan ketimpangan regional. Pertumbuhan ekonomi, pendidikan, partisipasi dan tingkat investasi mampu mengurangi ketidaksetaraan regional.



Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Sumber Referensi	Judul Penelitian	Variabel dan Alat Analisis	Ringkasan Hasil
1.	Afifah Nur Islami 2018	Skripsi dari Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	<i>Input:</i> PAD, DAK, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung. <i>Output:</i> Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dependen: Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Independen: Jumlah Penduduk, PDRB, Pendidikan Alat Analisis: Pendekatan <i>Stochastic Frontier Approach</i> (SFA)	Rata-rata tingkat efisien kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 tidak mencapai nilai efisiensi yang sempurna. Secara simultan variabel jumlah penduduk, PDRB, dan pendidikan berpengaruh terhadap efisiensi kinerja fiskal. Sedangkan secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap efisiensi kinerja fiskal. Kemudian variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja fiskal. Dan variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja fiskal.
2.	Muhammad Syauqi, dkk 2017	Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9, No. 2, Juni 2017 dari Fakultas Ekonomi dan	Strategi Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Bogor Dalam Pengelolaan APBD	Dependen: Kinerja Keuangan Daerah Independen: Investasi PDRB, Pajak Daerah Alat Analisis: <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	Kinerja Keuangan pemerintah Kota Bogor pada tahun 2005-2014 masih belum stabil atau belum baik. Variabel investasi, pendapatan perkapita, dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan

		Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB)			terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor.
3.	Syamsudin, dkk 2015	Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 17, No. 1, Juni 2015 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan	Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Kemiskinan Independen: Kinerja Keuangan (Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi) Alat Analisis: Regresi Berganda	Rasio efektifitas dan rasio efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan rasio kemandirian berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota di kawasan Solo raya, artinya semakin besar PAD maka semakin mandiri daerah tersebut.
4.	Crisna Dwi Heryanti, dkk 2019	Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan Vol. 3, No. 1, Maret 2019	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	Dependen: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) Independen: PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Regresi Berganda	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

					kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
5.	Vera Lisna, dkk 2013	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 14, No. 1, Juli 2013 dari Badan Pusat Statistik dan Fakultas Ekonomi Manajemen, Pascasarjana IPB	Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan	Dependen: Tingkat kemiskinan Independen: Pajak Daerah, DBH, DAU Alat Analisis: Persamaan Simultan Dinamis	DAU tidak memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan diduga adanya fenomena <i>fly paper effect</i> terutama untuk membiayai pembangunan daerah. Kebijakan kapasitas fiskal daerah dari pajak dan DBH mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dibandingkan kebijakan transfer fiskal.
6.	Puguh Hermawan dan Candra Pajri Ananda 2013	Jurnal Ilmiah dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang	Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Publik (Studi kasus: 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2006-2010)	Input: Kesehatan, Pendidikan, Distribusi, Stabilitas dan Kinerja Ekonomi Output: Skor Efisiensi Penyebaran dari Alokasi Anggaran Alat Analisis: <i>Envelopmen Analysis</i> (DEA)	Terjadinya peningkatan yang signifikan atas efisiensi alokasi anggaran pemerintah sektor publik yang didominasi daerah perkotaan (Surabaya, Malang, Batu). Yang mana di daerah tersebut APBD bidang kesehatan dan pendidikan memperoleh skor efisiensi relatif tinggi. Sedangkan di daerah lainnya masih perlu perhatian khusus karena rendahnya efisiensi kinerja sosial.

7.	Tumpal Manik,M.Si 2015	JEMI Vol. 6, No. 2, Desember 2015 dari Universitas Maritin Raja Ali Haji.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau	Dependen: Kinerja Keuangan Daerah Independen: Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD	Secara simultan belanja modal, dana perimbangan dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
8.	Afrizal Tohar dan Maulida Zakhiya 2011	Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12, NO. 1, Januari 2011	Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi daerah	Dependen: PAD, DAU di Kalimantan Independen: Kemandirian Daerah(Rasio Kemandirian),	PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Akan tetapi

				Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Metode: Analisis regresi berganda dengan perluasan jalur	PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
9.	Karen dautyan 2014	Research Institute of Applied Economics	Interrelation Among Economic Growth, Income Inequality and Fiscal Performance: Evidence from Anglo Saxon Countries	Variabel: Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Kinerja Fiskal Metodologi: VAR Struktural Methodology: VAR	Ketimpangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kasus Inggris, efek positif dalam kasus AS dan Kanada. Peningkatan ketimpangan pendapatan memperburuk kinerja fiskal untuk semua negara
10.	Syawal Zakaria 2013	Journal of Economics and Sustainable Development	The Impact of Fiscal Decentralization Toward Regional Inequalities In Eastern Region of Indonesia	Variabel: Pertumbuhan Penduduk, Pendidikan, Partisipasi, Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Investasi Kontrol: Variabel Terkait: Ketimpangan Wilayah	Desentralisasi Fiskal belum mampu mengurangi ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka memang berpengaruh pada peningkatan ketimpangan regional. Pertumbuhan ekonomi, pendidikan, partisipasi dan tingkat investasi mampu mengurangi ketimpangan daerah.

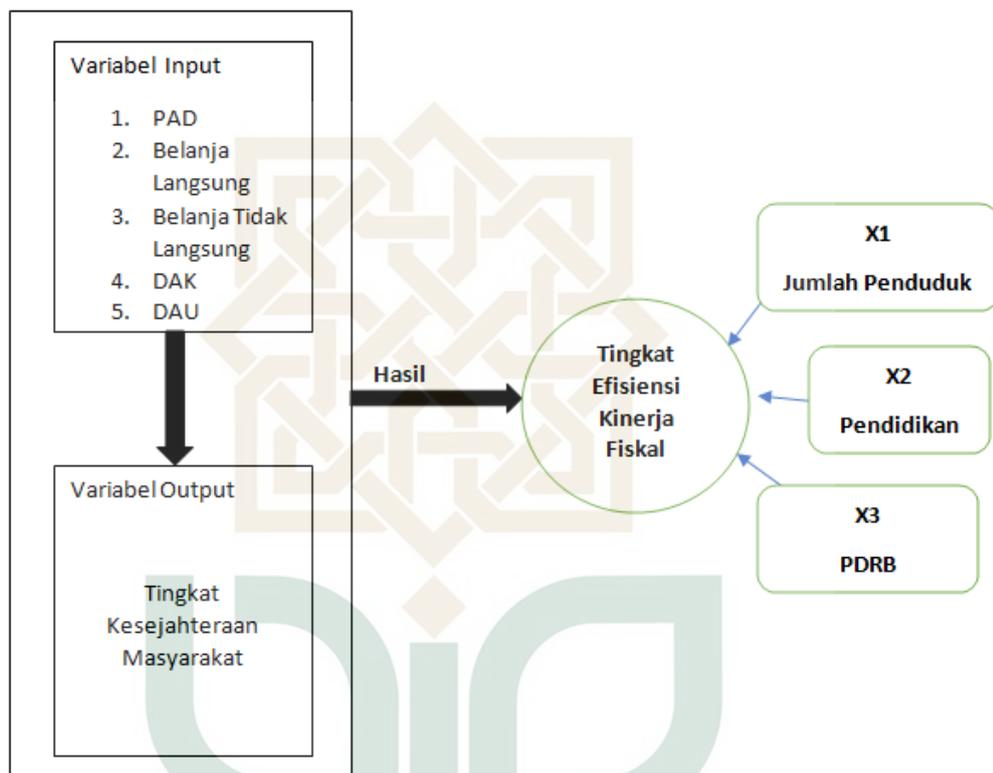
Setelah membaca Tabel 2.1 diatas yang berisi tentang penelitian-penelitian tentang efisiensi kinerja fiskal diberbagai daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dapat diketahui bahwa letak perbedaannya terdapat pada alat analisis dan objeknya. Penelitian ini dikembangkan dengan metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) untuk mengukur tingkat efisiensi dari kinerja fiskal di Sumatera Utara dengan alat analisis *software Frintier 4.1*. Selain itu, Penyusun juga akan meregresikan faktor-faktor yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap efisiensi di Sumatera Utara, yaitu: jumlah penduduk, pendidikan, dan PDRB dengan bantuan alat analisis Eviews 10. Kerangka pemikiran yang dibangun meliputi dua tahap analisis.

### C. Kerangka Pemikiran

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu menentukan nilai efisiensi kinerja fiskal per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang nantinya akan dijadikan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Pengukuran nilai efisiensi tersebut diolah dengan bantuan metode *software Stochastic Frontier Approach* atau biasa disebut dengan SFA dengan pendekatan produksi. Dalam pengolahannya membutuhkan variabel input dan output. Variabel input yang digunakan antara lain PAD, DAK, DAU, Belanja daerah (langsung dan tidak langsung), sedangkan variabel output yang digunakan berupa kesejahteraan masyarakat yang dilihat melalui jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota.

Kemudian tahap kedua melakukan pengujian faktor yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap efisiensi dari kinerja fiskal. Faktor yang

digunakan dalam penelitian ini antara lain jumlah penduduk, pendidikan, dan PDRB dengan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan *software Eviews 10*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **D. Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan dari sebelumnya sehingga didapatkan hipotesis sebagai berikut:

##### **1. Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

Menurut teori pengeluaran pemerintah Keynes yang menjelaskan bahwa peningkatan belanja masyarakat dipengaruhi pengaruh campuran dari pemerintah baik dengan memberikan uang kepada masyarakat maupun pembelian barang dan jasa dari pemerintah sendiri. Dari pemberian dana tersebut tujuan dari pemerintah ialah untuk memberikan dorongan dalam pembangunan ekonomi yang lebih baik dan tepat sasaran, sehingga itu nanti akan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang paling penting dalam pemberian kesejahteraan adalah tingkat efisien daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Penjelasan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Dewi (2018) yang menyatakan bahwa PAD dan dana perimbangan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PAD dan dana perimbangan yang didapatkan, maka akan semakin meningkat pula alokasi dana yang dikeluarkan untuk kebutuhan publik dalam pembangunan prasarana publik. Sehingga bisa didapatkan hipotesis bahwa PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal di Sumatera Utara**

Menurut Pujualwanto (2014) Teori Keynesian memiliki pandangan bahwa bertambahnya jumlah penduduk bukan hanya tambahan penduduk saja, akan tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat menjadi lebih meningkat. Dengan bertambahnya penduduk, maka akan memicu kemajuan yang lainnya seperti kemajuan produktivitas dan bertambahnya jumlah permintaan tenaga kerja . Dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk maka efisiensi kinerja fiskal juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Norfridwitya (2006) menjelaskan terkait jumlah penduduk yang meningkat memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas ekonomi. Artinya, Apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan maka akan memberikan pengaruh yang positif untuk tingkat efisiensi kinerja fiskalnya. Dari penelitian tersebut bisa didapatkan hipotesis bahwa:

$H_1$  : jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap efisiensi dari kinerja fiskal.

## **3. Pengaruh Pendidikan terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal di Sumatera Utara.**

Pendidikan memiliki peranan yang berfungsi untuk memberikan penguatan dalam mengurangi jumlah kemiskinan di daerah. Menurut Djatmika, (2009) tujuan utama dalam melaksanakan peranan pendidikan

tersebut dalam pemberian penguatan program pengentasan kemiskinan ialah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang baik.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) yang meneliti terkait pengaruh variabel pendidikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa RLS memiliki pengaruh atau hubungan negatif terhadap jumlah dari penduduk miskin. Artinya ketika variabel pendidikan meningkat maka, mutu dari sumber daya manusianya mengalami peningkatan juga. Itu menandakan bahwa variabel pendidikan bisa menurunkan dari tingkat dari penduduk miskin. Dari penjelasan tersebut bisa ditarik hipotesis bahwa:

$H_3$  : Pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap efisiensi dari kinerja fiskal.

#### **4. Pengaruh PDRB terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal di Sumatera Utara**

Menurut Sukirno (2006) Dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu berkelanjutan dalam jangka panjang belum tentu akan mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat ataupun kesejahteraan masyarakat yang meningkat seperti kenaikan pendapatan. Dapat diartikan ketika semakin besarnya pendapatan yang diterima masyarakat, maka akan meningkatkan pula daya beli penduduknya. Sehingga kebutuhan ekonomi bisa tercukupi dan kesejahteraannya menjadi meningkat.

Adolf Wagner ( Mangkoesobroto, 2010) yang menuliskan ketika pendapatan perkapita beriringan dengan pengeluaran pemerintah. Artinya ketika pendapatan perkapita mengalami peningkatan maka akan diikuti

pengeluaran pemerintah yang meningkat pula. Berdasarkan teori tersebut, penelitian yang dilakukan Linda (2014) dari keduanya tersebut antara pendapatan perkapita dengan pengeluaran memiliki keterkaitan. Dapat diartikan bahwa kesejahteraan dapat meningkat ketika perekonomiannya meningkat. Dari penjelasan tersebut, bisa ditarik hipotesis bahwa:

$H_2$  : PDRB mempunyai pengaruh yang positif terhadap efisiensi dari kinerja fiskal.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian, Sumber, dan Jenis Data**

Metode pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Metode analisis ini merupakan metode untuk menguji sebuah teori dengan melakukan pengukuran dan menganalisis variabel penelitian sesuai ketentuan dalam statistik yang dituliskan dalam angka (Sugiyono, 2011).

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data itu didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan kementerian keuangan dan SIMREG Bappenas. Data tersebut seperti data PAD, Belanja daerah (langsung dan tidak langsung), DAK, DAU, jumlah penduduk dan penduduk miskin, pendidikan dan PDRB.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi ialah keseluruhan dari pengamatan yang menjadi suatu perhatian baik yang terhingga maupun tidak terhingga atau dapat dikatakan sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena yang tergantung dari kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan (Faradis, 2017). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh data terkait PAD, belanja daerah (langsung dan tidak langsung), DAK, DAU, jumlah dari penduduk serta penduduk miskin, pendidikan dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara pada 33 kabupaten/kota tahun 2014-2019.

Sampel adalah bagian yang mewakili dari populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Sampel pada penelitian ini berupa data terkait PAD, belanja daerah (langsung dan tidak langsung), DAK, DAU, jumlah penduduk serta penduduk miskin, pendidikan dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara pada 33 kabupaten/kota tahun 2014-2019.

### C. Definisi Operasional Variabel

#### 1) Variabel Input

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh daerah. penerimaan pendapatan ini seperti pemasukan dari pajak, retribusi, bahkan dari pengolahan kekayaannya sendiri ataupun pendapatan yang sah lainnya (Halim, 2011).

Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan (Rp).

##### b. Belanja Langsung Daerah

Belanja langsung adalah belanja daerah yang berhubungan langsung dengan anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah lainnya yang fokus dalam perbaikan atau pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pada bidang infrastruktur ataupun lainnya.

Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan (Rp).

c. Belanja Tidak Langsung Daerah

Belanja tidak langsung daerah merupakan anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kegiatan. Tetapi untuk mendanai kegiatan rutin seperti belanja kepegawaian dan belanja barang dan jasa.

Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan (Rp).

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana alokasi negara yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota sebagai dana khusus dalam mengurus pemerintah daerahnya yang sesuai dengan yang diprioritaskan secara nasional.

Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan (Rp).

e. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU ialah dana dari pemerintah pusat yang nantinya akan dialokasikan kepada setiap daerah otonom baik itu provinsi, kabupaten maupun kota pada setiap tahunnya untuk dana dalam pembangunan.

Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan (Rp).

2) Variabel Output

Penelitian ini menggunakan variabel output berupa tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan jumlah dari penduduk miskin karena dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan kemiskinan disini ialah keadaan

seseorang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Timbulnya kemiskinan ini diakibatkan karena adanya kelangkaan alat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya dan bisa terjadi karena kesulitan masyarakat dalam mengakses sebuah pendidikan atau pekerjaan.

Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan (Jiwa).

### 3) Variabel Dependen

#### a. Tingkat Efisiensi (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini merupakan rasio antara input dan output atau kemampuan dari pemerintah dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan kemampuan yang baik sehingga menghasilkan keluaran dari input yang digunakan. Dalam penelitian ini juga nilai efisiensi dihasilkan melalui perhitungan dengan metode SFA dalam satuan (%).

### 4) Variabel Independen

#### a. Jumlah Penduduk

penduduk merupakan jumlah seseorang atau manusia yang menetap disuatu wilayah dan mempunyai pekerjaan yang tetap di daerah tersebut serta tercatat sesuai peraturan yang berlaku didaerah tersebut. Jumlah penduduk ini merupakan indikator dalam mengukur pendidikan. Dalam penelitian ini satuan yang digunakan adalah (Jiwa)

#### b. Pendidikan

Pendidikan merupakan kemampuan seseorang dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pada dirinya, peningkatan ini dilakukan

dengan mengikuti pembelajaran/pengajaran, pelatihan, maupun melakukan penelitian. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan RLS. Dalam Penelitian ini satuan yang digunakan adalah (Tahun).

c. PDRB

Perhitungan PDRB bertujuan untuk membantu dalam membuat kebijakan daerah dan menggambarkan perekonomian daerah tersebut. Indikator yang digunakan ialah PDRB atas harga konstan. Dalam penelitian ini satuan yang digunakan adalah (Rp).

**D. Teknik Analisis Data**

1. Pengukuran Efisiensi Fiskal dengan Metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA)

Dalam pengukuran efisiensi kinerja fiskal di Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode *Stochastic Frontier Analysis* menggunakan fungsi produksi dengan bantuan Software Frontier 4.1. Hasil dari pengukurannya nanti dalam bentuk skor antara 0-1 atau 0%-100%. Arti dari skor tersebut adalah ketika skornya semakin mendekati 100% maka semakin efisien kinerja fiskal tersebut, begitu sebaliknya jika nilainya menjauhi 100% atau mendekati 0% maka semakin tidak efisien kinerja fiskalnya. Metode SFA ini menggunakan fungsi produksi dalam bentuk log yaitu:

$$\ln(Q)_1 = \beta_0 + \beta_1 \ln(P)_1 + \beta_2 \ln(P)_2 + \dots + \beta_n \ln(P)_n + E_n$$

Dimana:

$Q_1$  = Kuantitas Output

$p_1 p_2 p_3$  = Input

$E_n$  = Error Term

Efisiensi produksi ialah hubungan antara input dan output suatu perusahaan yang nantinya akan menghasilkan hasil yang optimum. Pada penelitian ini menggunakan efisiensi fungsi produksi karena variabel input yang digunakan ialah PAD, DAK, DAU, Belanja Daerah (Langsung dan Tidak Langsung). Yang nantinya akan di hubungkan dengan variabel output berupa kesejahteraan masyarakat yang diproksikan melalui jumlah penduduk miskin.

## 2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Kinerja Fiskal dengan Metode Regresi Data Panel

Dalam pengujian statistik dan ekonometrika pada penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk melihat tingkat pengaruh terhadap efisiensi kinerja fiskal di Sumatera Utara. Dalam Pengolahannya di bantu dengan software *Eviews 10* dan dilanjutkan pengujian *model Uji Chow* dan *Uji Hausman*, serta menguji *uji F* dan *T*.

Secara umum didapat model persamaannya sebagai berikut:

$$EKF_{it} = \beta_0 + \beta_1 P_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

EKF = Tingkat efisiensi kinerja fiskal

P = Penduduk

PE = Pendidikan

PDRB = PDRB

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi

$\varepsilon$  = Standar Kesalahan (*Error*)

$i$  = Kabupaten/kota

$t$  = Tahun

Data Panel merupakan kombinasi antara *cross section* sama *time series*.

Menurut Porter (2009) terdapat tiga macam pendekatan regresi data panel yang bisa dilakukan yaitu:

- a. Pendekatan *Common Effect*, sering disebut metode OLS (*Ordinary Least Square*) merupakan metode pendekatan yang tidak memperhatikan pada dimensi individu maupun waktu.
- b. Pendekatan *Fixed Effect*, pendekatan ini bersifat konstan antar observasi *cross section* dan konstan antar observasi *time series*.
- c. Pendekatan *Random Effect*, digunakan ketika *unobservasieffect* yang dapat diasumsikan tidak berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas.

Sedangkan dalam melakukan pemulihan model yang terbaik, maka diperlukan prosedur pengujian yang terbaik dalam regresi panel yaitu sebagai berikut:

a. Uji *Chow-test* atau *Likelihood Ratio-test*

Uji Chow adalah uji yang digunakan untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang paling baik untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan:

$H_0$  : Pilih *Common Effect*; jika nilai probabilitas  $>$  nilai  $\alpha$

$H_a$  : Pilih *Fixed Effect*; jika nilai probabilitas  $<$  nilai  $\alpha$

**b. Uji Hausman test**

Uji Hausman dapat dilakukan ketika hasil dari uji Chow dan LM tidak konsisten. Jika uji Hausman adalah pengujian untuk model yang digunakan apakah *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang baik digunakan dalam melakukan estimasi data panel. Apabila hasilnya:

$H_0$  : Pilih *Random Effect*; jika nilai probabilitas  $>$  nilai  $\alpha$

$H_a$  : Pilih *Fixed Effect*; jika nilai probabilitas  $<$  nilai  $\alpha$

**Uji Hipotesis**

Melalui analisis tersebut, maka diuji kebenarannya hipotesis tersebut yang sudah ditetapkan dan diinterpretasikan hasilnya. Dengan bantuan software Eviews 10 dapat mempermudah dalam melakukan pengolahan dengan melihat hasil output yang didapatkan.

**• Koefisien Determinan**

Koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan oleh penelitian untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen yang dijelaskan dalam model terhadap variabel dependen. Nilai yang digunakan antara 0 – 1. Dikatakan mampu menjelaskan seluruh informasi apabila nilai mendekati angka 1, dan sebaliknya jika mendekati angka nol berarti kemampuan dalam menjelaskan informasi belum sempurna.

- **Uji Statistik F**

Uji tersebut untuk menguji secara simultan pengaruh dari variabel independen (jumlah penduduk, pendidikan, PDRB) terhadap variabel dependen (tingkat efisiensi kinerja fiskal).

Adapun keputusan uji statistik f adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi  $< (0,05)$  maka tidak menerima  $H_0$

Jika nilai signifikansi  $> (0,05)$  maka tidak bisa menolak  $H_0$

- **Uji t (Uji Parsial)**

Uji ini digunakan dalam menguji pengaruh koefisien secara individual terhadap variabel independen.

Adapun keputusan uji statistik t adalah sebagai berikut:

Apabila signifikansi  $< (0,05)$  maka  $H_0$  Tidak bisa diterima

Apabila signifikansi  $> (0,05)$  maka  $H_0$  tidak bisa ditolak

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Geografis Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ini terletak pada  $1^{\circ}$  -  $4^{\circ}$  LU dan  $98^{\circ}$  -  $100^{\circ}$ BT. Berdasarkan letak geografis Provinsi Sumatera Utara memiliki batas-batas diantaranya:

- a. Sebelah utara : Provinsi Aceh.
- b. Sebelah selatan: Provinsi Riau dan Sumatera Barat.
- c. Sebelah timur : Negara Malaysia di Selat Malaka.
- d. Sebelah barat : Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Utara mempunyai luas wilayah sekitar 72,981, 23 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan kabupaten/kota, daerah yang memiliki luas paling besar ialah Kabupaten Langkat dengan luas sekitar 6.262,00 km<sup>2</sup> (8,58%), kemudian Kabupaten Mandailing Natal sekitar 6.134,00 km<sup>2</sup> (8,40%), dan diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Selatan sekitar 6.030,47 km<sup>2</sup> (8,26%). Sedangkan luas daerah yang paling kecil dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi dengan luas sekitar 32,00 km<sup>2</sup> (0,04%).

Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dengan suhu maksimum sekitar 32,2<sup>0</sup>C sampai 36,4<sup>0</sup>C, dan suhu minimum sebesar 19,0<sup>0</sup>C sampai 22,4<sup>0</sup>C. Menurut data stasiun BMKG hari hujan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sekitar 4-28 hari/bulan lebih tinggi dari tahun 2018

dengan hari hujan sekitar 8-26 hari/bulan. Sedangkan rata-rata curah hujan pada tahun 2019 mencapai 1.479 mm – 4.023 mm lebih rendah dari tahun 2018 yaitu kisaran 1.491 mm – 5.251 mm.

## **B. Gambaran Umum Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, diantaranya Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Begadai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Lawang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias barat, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kota Gunungsitoli.

Pengukuran tingkat efisiensi kinerja kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara tertuju pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pada penelitian ini tingkat kesejahteraan diproksikan dengan jumlah dari penduduk miskinnya, karena Indikator dari kesejahteraan ini bisa diukur dengan tingkat

kemiskinan sendiri, angka buta huruf dan melek huruf, emisi gas CO<sub>2</sub>, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan PDB (Thomas, 2005: 15). Daerah dikatakan sejahtera ketika daerah tersebut mampu menjalankan kinerja fiskalnya dengan efisien, maksudnya pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber dayanya secara optimal sehingga bisa mengurangi kecemburuan sosial.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan alat untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu APBD. Pada penelitian variabel input yang digunakan untuk menghitung efisiensi berupa data PAD, DAK, DAU, dan belanja daerah (langsung dan tidak langsung). Data tersebut diambil dari biaya realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019. Sedangkan variabel output pada penelitian ini berupa kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan jumlah penduduk miskin sebagai indikatornya. Sedangkan dalam perhitungan nilai efisiensinya menggunakan metode SFA melalui *software Frontier 4.1*.

Setelah hasil efisiensinya keluar, disitu dapat dianalisis terkait kinerja fiskal kabupaten/kotanya apakah efisien atau tidak. Kemudian dilanjutkan pengujian variabel independen yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap efisiensi kinerja fiskal. Variabel tersebut berupa jumlah penduduk, pendidikan, dan nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019. Dalam pengolahannya menggunakan metode regresi data panel dengan alat bantu berupa *software eviews 10*.

## C. Penjelasan Variabel Penelitian

### a. Jumlah Penduduk (X1)

Jumlah penduduk merupakan indikator dalam menghitung rata-rata lama sekolah atau biasa disingkat dengan RLS. Menurut BPS jumlah penduduk ialah seluruh manusia baik itu laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal disuatu wilayah (Indonesia) selama 6 bulan bahkan bisa lebih, dan mereka yang bertempat tinggal kurang dari 6 bulan dengan tujuan ingin menetap di wilayah tersebut. Selain itu dijelaskan bahwa penduduk memiliki posisi sebagai pelaku produksi dan sebagai pelaku konsumen dalam pembangunan (Hardian, 2009). Sebagai pelaku produksi diharapkan dengan bertambahnya penduduk mampu meningkatkan hasil produksinya sehingga permintaan masyarakat bisa terpenuhi dan bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan jumlah penduduk per kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebagai variabel independen yang didapatkan dari BPS Sumatera Utara. Variabel jumlah penduduk ini yang nantinya akan di regresikan dengan variabel tingkat kesejahteraan berupa efisiensi kinerja fiskal. Hasil dari pengujian nanti bisa berpengaruh positif dan juga negatif, karena setiap daerah memiliki faktor masalah yang berbeda. Berikut tabel jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun 2014-2019 :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014-2019**

Kabupaten/kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Nias	139.862	140.613	141.403	142.110	142.840	143.319
Kab. Mandailing Natal	426.382	430.894	435.303	439.505	443.490	447.287
Kab. Tapanuli Selatan	273.132	275.098	276.889	278.587	280.283	281.931
Kab. Tapanuli Tengah	342.902	350.017	356.918	363.705	370.171	376.667
Kab. Tapanuli Utara	290.864	293.399	295.613	297.806	299.881	301.789
Kab. Toba Samosir	178.568	179.704	180.694	181.790	182.673	183.712
Kab. Labuhan Batu	453.630	462.191	470.511	478.593	486.480	494.178
Kab. Asahan	699.720	706.283	712.684	718.718	724.379	729.795
Kab. Simalungun	844.033	849.405	854.489	859.228	863.693	867.922
Kab. Dairi	277.575	279.090	280.610	281.876	283.203	284.304
Kab. Karo	382.622	389.591	396.598	403.207	409.675	415.878
Kab. Deli Serdang	1.984.598	2.029.308	2.072.521	2.114.627	2.155.625	2.195.709
Kab. Langkat	1.005.965	1.013.385	1.021.208	1.028.309	1.035.411	1.041.775
Kab. Nias Selatan	305.010	308.281	311.319	314.395	317.207	319.902
Kab. Humbang Hasundutan	181.026	182.991	184.915	186.694	188.480	190.186
Kab. Pakpak Bharat	44.520	45.516	46.392	47.183	48.119	48.935
Kab. Samosir	123.065	123.789	124.496	125.099	125.816	126.188
Kab. Serdang Bedagai	606.367	608.691	610.906	612.924	614.618	616.396
Kab. Batu Bara	396.479	400.803	404.988	409.091	412.992	416.493
Kab. Padang Lawas Utara	247.286	252.589	257.807	262.895	267.771	272.713
Kab. Padang Lawas	251.927	258.003	263.784	269.799	275.515	281.239
Kab. Labuhanbatu Selatan	307.171	313.884	320.381	326.825	332.922	338.982
Kab. Labuhanbatu Utara	347.465	351.097	354.485	357.691	360.926	363.816
Kab. Nias Utara	132.735	133.897	135.013	136.090	137.002	137.967
Kab. Nias Barat	79.876	80.419	80.785	81.279	81.663	82.154
Kota Sibolga	86.166	86.519	86.789	87.090	87.317	87.626
Kota Tanjung Balai	164.675	167.012	169.084	171.187	173.302	175.223
Kota Pematang Siantar	245.104	247.411	249.505	251.513	253.500	255.317
Kota Tebing Tinggi	154.804	156.815	158.902	160.686	162.581	164.402
Kota Medan	2.191.140	2.210.624	2.229.408	2.247.425	2.264.145	2.279.894
Kota Binjai	261.490	264.687	267.901	270.926	273.892	276.597
Kota Padangsidimpuan	206.496	209.796	212.917	216.013	218.892	221.827
Kota Gunungsitoli	134.196	135.995	137.693	139.281	140.927	142.426

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2020

Berdasarkan tabel tersebut (4.1) dapat diketahui bahwa perubahan jumlah penduduk dari tahun 2014-2015 per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selalu meningkat. Hal ini yang menjadikan Sumatera Utara mendapat peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2019 jumlah penduduknya mencapai 14.562.549 jiwa, dari total tersebut terdiri dari 7.266.207 jiwa penduduk yang berkelamin laki-laki dan 7.296.342 berkelamin perempuan. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut pada tahun 2019 penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sekitar 7,28 juta jiwa (50,02%) lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di perdesaan yaitu sekitar 7,28 juta jiwa (49,98%). Jika membandingkan jumlah penduduk per kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, Kota Medan memiliki penduduk paling banyak pada tahun 2019 yaitu berjumlah 2.279.894 jiwa, kemudian diikuti Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 2.195.709 jiwa dan diikuti juga Kabupaten Langkat dengan total penduduk 1.041.775 jiwa. Sedangkan penduduknya paling sedikit ada di Kabupaten Nias Barat yaitu sekitar 82.154 jiwa.

#### **b. Pendidikan (X2)**

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perekonomian daerah yang lebih baik yaitu dengan memperbaiki sumber daya manusianya (SDM). Dengan SDM yang baik dapat meningkatkan kemampuan dalam produksi, sehingga nantinya bisa menciptakan kesejahteraan daerah. Dapat diartikan bahwa pendidikan ini dianggap sebagai peranan utama dalam

membentuk kemampuan sebuah negara berkembang dalam menyerap teknologi yang lebih modern, yang nantinya mampu meningkatkan kapasitas produksi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro,2006). Pada penelitian ini variabel pendidikan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS). RLS ialah rata-rata jumlah tahun sekolah yang ditempuh penduduk sampai tamat sekolah baik dari pendidikan SD sampai pendidikan terakhir yang ditempuh. Jadi, dengan melihat perhitungan rata-rata sekolah ini dapat menggambarkan pendidikan yang ditempuh antar kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Dalam perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tinggi pula pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Dengan tingginya pendidikan yang ditempuh diharapkan mampu menciptakan SDM yang memiliki kualitas baik, sehingga bisa membantu dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019**

Kabupaten/kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Nias	4,75	4,76	4,92	4,93	4,94	5,15
Kab. Mandailing Natal	7,54	7,63	7,89	8	8,11	8,36
Kab. Tapanuli Selatan	8,22	8,27	8,35	8,67	8,7	8,97
Kab. Tapanuli Tengah	7,55	8,02	8,03	8,28	8,29	8,48
Kab. Tapanuli Utara	9,05	9,31	9,32	9,46	9,65	9,71
Kab. Toba Samosir	9,83	10,08	10,09	10,1	10,34	10,36
Kab. Labuhan Batu	8,68	8,75	8,78	9,01	9,04	9,23
Kab. Asahan	7,98	8,32	8,33	8,46	8,47	8,49
Kab. Simalungun	8,7	8,8	8,86	8,95	9,18	9,36
Kab. Dairi	8,59	8,69	8,7	8,9	9,15	9,34

Kab. Karo	9,33	9,5	9,51	9,54	9,55	9,62
Kab. Deli Serdang	9,46	9,48	9,68	9,7	9,92	10,08
Kab. Langkat	7,85	7,92	8,18	8,51	8,52	8,64
Kab. Nias Selatan	4,64	4,64	4,65	4,95	5,2	5,53
Kab. Humbang Hasundutan	8,88	8,9	8,91	9,1	9,28	9,53
Kab. Pakpak Bharat	8,39	8,45	8,46	8,47	8,48	8,73
Kab. Samosir	8,57	8,84	8,94	8,95	9,14	9,15
Kab. Serdang Bedagai	8,04	8,08	8,34	8,35	8,51	8,53
Kab. Batu Bara	7,72	7,74	7,75	7,83	7,84	8,02
Kab. Padang Lawas Utara	8,44	8,91	8,92	8,93	9,06	9,1
Kab. Padang Lawas	8,16	8,4	8,41	8,43	8,67	8,69
Kab. Labuhanbatu Selatan	8,67	8,68	8,69	8,7	8,71	8,74
Kab. Labuhanbatu Utara	8,27	8,31	8,33	8,34	8,35	8,36
Kab. Nias Utara	6,05	6,06	6,07	6,08	6,09	6,25
Kab. Nias Barat	5,73	5,74	5,77	5,78	6	6,14
Kota Sibolga	9,83	9,85	9,86	9,87	9,91	10,18
Kota Tanjung Balai	9,03	9,12	9,13	9,14	9,24	9,26
Kota Pematang Siantar	10,7	10,73	10,75	11,06	11,08	11,15
Kota Tebing Tinggi	10,05	10,06	10,07	10,09	10,24	10,28
Kota Medan	10,88	11	11,18	11,25	11,37	11,38
Kota Binjai	9,77	10,28	10,28	10,58	10,75	10,77
Kota Padangsidimpuan	10,13	10,47	10,48	10,56	10,63	10,7
Kota Gunungsitoli	8,17	8,18	8,2	8,4	8,41	8,58

Sumber: BPS Sumatera Utara 2020

tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan memberikan dampak terhadap capaian pendidikan penduduk yang berusia diatas 15 tahun yaitu setara dengan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP). Dari tabel diatas rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 terdapat di Kota Medan dengan angka 11,38, kemudian diikuti Kota Pematang Siantar dengan angka 11,15 dan yang ketiga diikuti oleh Kota Binjai dengan rata-rata lama sekolah 10,77. Sedangkan rata-rata lama sekolah

terendah diduduki oleh Kabupaten Nias dengan angka 5,15, kemudian diikuti Kabupaten Nias Selatan dengan angka 5,53 dan diikuti juga oleh Kabupaten Nias Barat yaitu 6,14. Selain itu juga, dapat diketahui bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah setiap tahunnya meningkat dengan cukup lambat. Hal ini disebabkan karena pendidikan antar daerah baik di perkotaan atau dipedesaan masih terjadi kesenjangan penduduk. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih memperhatikan keadaan daerahnya lagi agar kesenjangan penduduk bisa teratasi dengan baik, Sehingga rata-rata lama sekolah bisa meningkat dengan cepat dan mampu meningkatkan kualitas penduduk agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan.

### c. PDRB (X3)

PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Secara istilah PDRB merupakan nilai tambah yang diperoleh dari suatu barang dan jasa suatu wilayah dalam periode tertentu. Pada Penelitian ini PDRB yang digunakan menggunakan atas dasar harga konstan pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai 2019. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan nilai tambah dari suatu barang dan jasa.

**Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2014-2019**

Kabupaten/kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Nias	1991,99	2100,11	2214,15	2325,01	24401,6	2563,03
Kab. Mandailing Natal	7036,9	7474,42	7933,13	8416,5	8904,14	9376,46
Kab. Tapanuli Selatan	7542,78	7921,24	8314,69	8748,18	9201,96	9683,66

Kab. Tapanuli Tengah	5460,78	5738,32	6032,21	6348,44	6678,25	7024,15
Kab. Tapanuli Utara	4645,42	4868,95	5070,19	5280,69	5510,19	5764,94
Kab. Toba Samosir	4355,07	4553,17	4767,98	5001,43	5249,25	5505,26
Kab. Labuhan Batu	18164,1	19079,93	20046,02	21048,17	22112,34	23232,71
Kab. Asahan	20004,51	21118,75	22302,7	23525,35	24844,87	26245,24
Kab. Simalungun	21194,28	22305,43	23508,97	24715,67	25996,21	27348,7
Kab. Dairi	5153,83	5413,75	5688,45	5968,81	6267,82	6569,81
Kab. Karo	11314,39	11880,93	12494,87	13145,85	13744,17	14376,28
Kab. Deli Serdang	55793,75	58722,46	61839,67	64991,87	68341	71878,69
Kab. Langkat	23157,01	24321,61	25533,81	26822,6	28170,08	29597,77
Kab. Nias Selatan	3356,39	3506,03	3659,77	3826,62	4018,74	4221,04
Kab. Humbang Hasundutan	3249,45	3419,57	3577,05	3756,66	3946,12	4141,1
Kab. Pakpak Bharat	639,29	677,18	717,89	760,55	805,01	852,3
Kab. Samosir	2367,1	2503,73	2635,77	2776,85	2931,7	3098,74
Kab. Serdang Bedagai	15080,38	15841,75	16656,17	17516,43	18421,38	19393,39
Kab. Batu Bara	19459,38	20259,69	21165,04	22034,26	22998,6	23998,59
Kab. Padang Lawas Utara	6228,35	6598,3	6991,66	7378,98	7791,05	8228,45
Kab. Padang Lawas	5997,31	6341,53	6725,98	7110,25	7534,3	7959,31
Kab. Labuhanbatu Selatan	14547,52	15294,17	16088,42	16907,59	17797,95	18750,16
Kab. Labuhanbatu Utara	13414,53	14109,37	14843,99	15602,05	16413,33	17259,19
Kab. Nias Utara	1847,62	1948	2043,91	2134,49	2228,75	2332,44
Kab. Nias Barat	970,55	1017,8	1074,48	1126,19	1179,91	1236,73
Kota Sibolga	2758,57	2914,51	3063,07	3224,58	3393,91	3570,33
Kota Tanjung Balai	4392,58	4637,5	4904,54	5174,85	5473,63	5790,37
Kota Pematang Siantar	7594,53	7992,32	8380,77	8750,15	9170,19	9611,74
Kota Tebing Tinggi	3084,05	3234,05	3400,75	3575,51	3760,5	3954,03
Kota Medan	117328,1	124277,5	132062,9	139739,3	148007,1	156780,6
Kota Binjai	6234,29	6571,2	6935,55	7309,57	7708,59	8133,54
Kota Padangsidimpuan	3285,46	3451,08	3636,87	3830,32	4038,93	4261,32
Kota Gunungsitoli	2565,26	2703,5	2876,34	3049,12	3232,97	3428,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selama peningkatan PDRB pada tahun itu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sekitar 5,23% lebih tinggi dari ekonomi nasional yaitu 5,01% dan selisih

0,01% dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2019. PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2019 Ibukota Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan) menempati urutan pertama dalam penambahan nilai tambah suatu barang dan jasa. Nilainya setiap tahun naik dari 117328,1 pada tahun 2014 bertambah menjadi 156780,6 pada tahun 2019. Urutan kedua diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang dengan nilai tambah 55793,75 pada tahun 2014 meningkat menjadi 71876,69 pada tahun 2019. Kemudian urutan ketiga diikuti oleh Kabupaten Langkat dengan nilai tambah sebesar 23157 pada tahun 2014 menjadi 29597,77 pada tahun 2019. Sedangkan nilai tambah paling sedikit ditempati oleh Kabupaten Pakpak Bharat 639,29 pada tahun 2014 menjadi 852,3 pada tahun 2019.

#### **d. Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota (Y)**

Pengukuran efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat keefisienan dari kinerja fiskal pemerintah daerah dalam penyaluran atau pengalokasian dana untuk masyarakat daerah. Tingkat efisien tersebut dapat diketahui dengan melihat hasil (Output) dari kemampuan yang dimiliki daerah (Output). Pada penelitian ini proses pengukuran efisiensi kinerja fiskal menggunakan lima variabel input dari APBD, variabel tersebut berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja daerah (langsung dan tidak langsung). Sedangkan Variabel Outputnya berupa kesejahteraan masyarakat yang diprosikan menggunakan data jumlah penduduk miskin kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Alat analisis yang digunakan dalam pengukuran tersebut menggunakan

bantuan metode *Stochastic Frontier Approach*, biasa dikenal dengan SFA, dengan *software Frontier 4.1*. Yang mana hasil dari pengolahan tersebut berupa angka antara 0-1 atau 0% - 100%.

**Tabel 4.4 Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2019**

Kabupaten/kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Nias	89,1	85,7	80,1	84,9	87,9	85,3
Kab. Mandailing Natal	88,3	87,7	87,5	87,2	86,5	80,0
Kab. Tapanuli Selatan	85,3	82,8	85,6	81,1	79,3	79,4
Kab. Tapanuli Tengah	88,1	90,8	88,3	88,2	90,1	82,9
Kab. Tapanuli Utara	87,2	87,4	85,5	80,9	80,3	72,0
Kab. Toba Samosir	84,4	84,2	84,1	86,4	83,7	82,8
Kab. Labuhan Batu	83,4	81,9	81,2	82,0	81,4	81,7
Kab. Asahan	91,5	88,8	90,2	85,9	84,6	83,9
Kab. Simalungun	89,4	85,4	87,9	82,7	83,2	82,2
Kab. Dairi	85,9	86,3	85,9	79,4	78,9	83,7
Kab. Karo	89,5	81,2	85,6	82,8	80,7	80,5
Kab. Deli Serdang	86,1	85,7	92,5	79,8	79,6	78,3
Kab. Langkat	94,3	94,7	93,8	93,7	93,6	93,8
Kab. Nias Selatan	90,0	91,4	90,9	83,1	90,0	89,2
Kab. Humbang Hasundutan	85,0	84,9	84,9	83,0	83,3	87,7
Kab. Pakpak Bharat	58,3	58,0	65,0	56,1	64,4	59,8
Kab. Samosir	84,9	89,1	86,0	86,4	87,1	85,0
Kab. Serdang Bedagai	88,3	89,9	83,4	83,9	80,5	89,8
Kab. Batu Bara	88,9	88,7	88,1	88,9	89,1	88,1
Kab. Padang Lawas Utara	90,7	90,9	89,0	84,8	87,1	85,7
Kab. Padang Lawas	87,3	85,3	88,3	82,0	81,6	73,2
Kab. Labuhanbatu Selatan	91,3	87,1	82,2	90,1	87,6	81,4
Kab. Labuhanbatu Utara	88,9	89,4	88,0	87,3	86,7	87,1
Kab. Nias Utara	92,2	90,3	90,3	90,3	88,2	88,7
Kab. Nias Barat	88,6	87,9	84,3	86,5	85,4	86,8
Kota Sibolga	82,8	78,4	82,9	80,9	78,0	72,0
Kota Tanjung Balai	89,8	87,6	82,2	79,1	83,8	86,7
Kota Pematang Siantar	82,0	85,3	80,7	81,2	77,7	78,5
Kota Tebing Tinggi	84,7	84,0	84,2	78,3	78,3	78,4
Kota Medan	92,7	92,4	94,3	93,1	91,3	92,6
Kota Binjai	85,1	84,6	83,5	79,0	77,1	74,4
Kota Padangsidimpuan	82,3	84,4	80,8	77,6	84,1	82,3
Kota Gunungsitoli	86,5	87,6	89,4	88,8	88,2	87,4

Sumber: Olah data Frontier 4.1

Dari tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa nilai efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Sumatera Utara belum ada yang mencapai pada tingkat efisien. Hal itu dibuktikan dengan angka efisiensi yang diperoleh setiap kabupaten/kota tidak ada yang memperoleh angka 100%, sehingga bisa dikatakan bahwa variabel keuangan yang dipakai dalam penelitian ini belum mampu memberikan capaian output yang lebih maksimal, sehingga masih ada variabel keuangan yang lain yang mampu memberikan capaian pengalokasian dana yang lebih optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

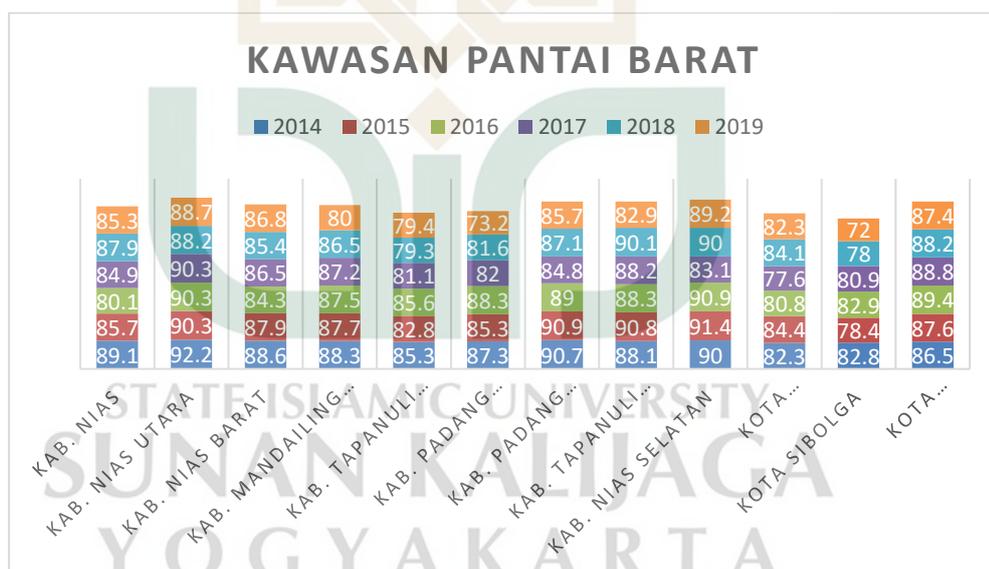
#### **D. Penjelasan Tingkat Efisiensi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019**

Pada bagian ini akan menjelaskan tingkat efisiensi dan rata-rata efisiensi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019 dengan bantuan metode *Stochastic Frontier Approach* atau dikenal dengan SFA dengan alat analisis berupa software *Frontier 4.1*. Hasil dari pengolahan tersebut akan didapatkan skor bilangan antara 0%-100%. Hasil dari tingkat efisiensi tersebut menjelaskan kemampuan kinerja pemerintah daerah dalam pengoptimalan alokasi dana yang dimiliki untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabaila kabupaten/kota mendapatkan skor atau nilai mendekati angka 0% itu artinya wilayah kabupaten/kota tersebut menjauhi dari tingkat efisien atau bisa dikatakan bahwa kemampuan wilayah tersebut dalam pengalokasian dana belum optimal. Adapun kebalikan dari itu, apabila skornya mendekati 100% itu artinya wilayah kabupaten/kota tersebut

mendekati dengan tingkat efisien atau bisa diartikan bahwa wilayah tersebut dalam pengalokasian dana kepada masyarakat sudah mendekati optimal.

Hasil efisiensi kinerja fiskal dari pengolahan variabel input terhadap output kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya dan memiliki rata-rata efisiensi secara keseluruhan sebesar 0,8472 ( 84,72%). Akan tetapi tidak ada kabupaten/kota yang mendapatkan nilai efisiensi mencapai 1 (100%). Berikut perbandingan tingkat efisiensi antar kabupaten/kota selama enam tahun berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam:

#### 1. Perbandingan Efisiensi Kabupaten/Kota Kawasan Pantai Barat



Sumber: Hasil *Frontier 4.1*

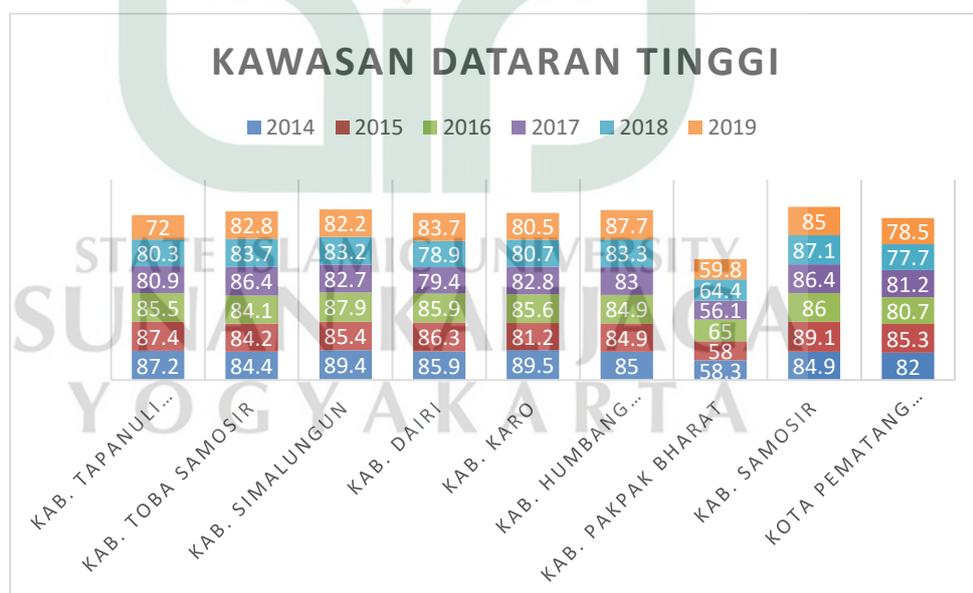
#### Grafik 4.1 Efisiensi Kinerja Fiskal Kawasan Pantai Barat

Dari grafik diatas (4.1) perolehan efisiensi kinerja fikal di Kawasan Pantai Barat mulai tahun 2014-2019 tidak selalu meningkat (fluktuatif).

Perolehan tingkat efisiensi paling tinggi di Kawasan Pantai Barat diperoleh oleh Kabupaten Nias Utara dengan rata-rata efisiensi sebesar 90%. Akan tetapi perolehan tingkat efisiensi paling rendah diduduki oleh Kota Sibolga dengan rata-rata efisiensi sebesar 79,2%. Dari kedua kabupaten/kota tersebut memiliki selisih nilai rata-rata sebesar 10,8%.

Berdasarkan hasil di atas tingkat efisiensi Kabupaten Nias Utara paling besar terjadi pada tahun 2014 yaitu sekitar 92,2% akan tetapi tingkat efisiensi paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sekitar 88,2%. Sedangkan pada Kota Sibolga tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan skor 82,9% kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2019 menjadi 72,0%.

## 2. Perbandingan Efisiensi Kabupaten/Kota Kawasan Dataran Tinggi



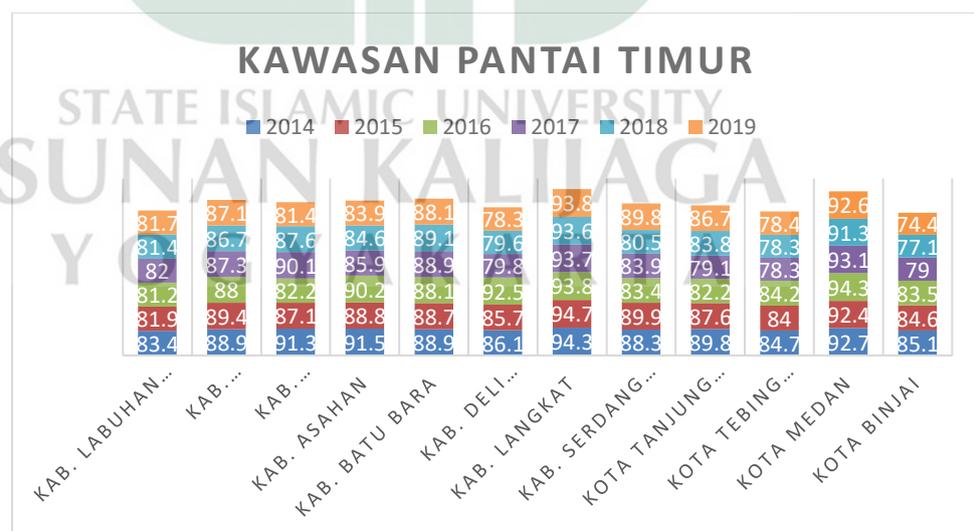
Sumber: Hasil *Frontier 4.1*

**Grafik 4.2 Efisiensi Kinerja Fiskal Kawasan Dataran Tinggi**

Dari grafik diatas (4.2) perolehan efisiensi kinerja fiskal di Kawasan Dataran Tinggi mulai tahun 2014-2019 peningkatannya tidak selalu meningkat (fluktuatif). Perolehan tingkat efisiensi paling tinggi di Kawasan Dataran Tinggi diperoleh oleh Kabupaten Simalungun dengan rata-rata efisiensi sebesar 85,1%. Akan tetapi perolehan tingkat efisiensi paling rendah diduduki oleh Kabupaten Pakpak Bharat dengan rata-rata efisiensi sebesar 60,3%. Dari kedua kabupaten/kota tersebut memiliki selisih nilai rata-rata sebesar 24,8%.

Kabupaten Simalungun pada tahun 2014 tingkat efisiensinya paling tinggi yaitu 89,4%, akan tetapi pada tahun 2019 tingkat efisiensinya menjadi menurun menjadi 82,2%. Sedangkan pada Kabupaten pakpak Bharat nilai efisiensinya paling tinggi pada tahun 2016 yaitu dengan skor 65,0%, sedangkan efisiensi terendah terjadi pada tahun 2017 dengan skor 56,1%.

### 3. Perbandingan Efisiensi Kabupaten/Kota Kawasan Dataran Tinggi



Sumber: Hasil *Frontier 4.1*

**Grafik 4.3 Efisiensi Kinerja Fiskal Kawasan Pantai Timur**

Dari grafik diatas (4.3) perolehan efisiensi kinerja fiskal di Kawasan Pantai Timur mulai tahun 2014-2019 peningkatannya tidak selalu meningkat (fluktuatif) seperti kawasan sebelumnya (Dataran Tinggi dan Pantai Barat). Perolehan tingkat efisiensi paling tinggi di Kawasan Pantai Timur diperoleh oleh Kabupaten Langkat dengan rata-rata efisiensi sebesar 94,0%. Akan tetapi perolehan tingkat efisiensi paling rendah diduduki oleh Kota Binjai dengan rata-rata efisiensi sebesar 80,6%. Dari kedua kabupaten/kota tersebut memiliki selisih nilai rata-rata sebesar 12,1,%.

Kabupaten Langkat Sumatera Utara dengan perolehan tingkat efisiensi tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya. Perolehan skor tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 94,7%, kemudian skor terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sekitar 93,6% dengan selisih yang tidak jauh dengan skor pada tahun 2015. Sedangkan Kota Binjai tingkat efisiensinya dari tahun 2014-2019 nilainya selalu menurun yaitu dari 85,1% menjadi 74,4 %.

pengukuran tingkat efisiensi kabupaten/kota menggunakan metode SFA pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) selama enam tahun yaitu dari tahun 2014-2019 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata tingkat efisiensi tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Langkat dengan angka 94,0 % kemudian diikuti Kota Medan dengan angka 92,7% dan yang ketiga diikuti juga oleh Kabupaten Nias Utara dengan angka 90,0%. Dari ketiga kabupaten tersebut nilainya belum ada yang berada pada tingkat efisien, karena nilai yang didapatkan masih memiliki selisih dengan

100%, akan tetapi bisa dikatakan bahwa ketiga kabupaten tersebut hampir mendekati nilai efisiensi. Sedangkan rata-rata efisiensi terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat dengan angka 60,3%.

**Tabel 4.5 Rata-rata Nilai Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2019**

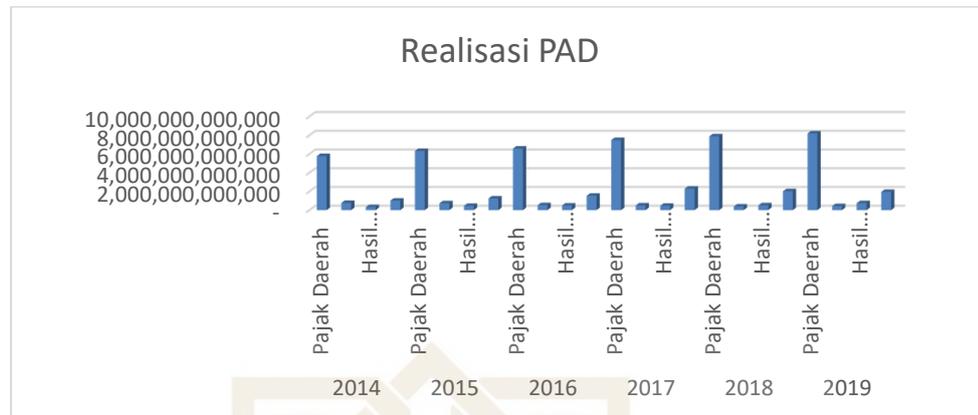
Kabupaten/kota	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kab. Nias	89,1	85,7	80,1	84,9	87,9	85,3	85,5
Kab. Mandailing Natal	88,3	87,7	87,5	87,2	86,5	80,0	86,2
Kab. Tapanuli Selatan	85,3	82,8	85,6	81,1	79,3	79,4	82,3
Kab. Tapanuli Tengah	88,1	90,8	88,3	88,2	90,1	82,9	87,5
Kab. Tapanuli Utara	87,2	87,4	85,5	80,9	80,3	72,0	82,2
Kab. Toba Samosir	84,4	84,2	84,1	86,4	83,7	82,8	84,3
Kab. Labuhan Batu	83,4	81,9	81,2	82,0	81,4	81,7	81,9
Kab. Asahan	91,5	88,8	90,2	85,9	84,6	83,9	87,5
Kab. Simalungun	89,4	85,4	87,9	82,7	83,2	82,2	85,1
Kab. Dairi	85,9	86,3	85,9	79,4	78,9	83,7	83,4
Kab. Karo	89,5	81,2	85,6	82,8	80,7	80,5	83,4
Kab. Deli Serdang	86,1	85,7	92,5	79,8	79,6	78,3	83,7
Kab. Langkat	94,3	94,7	93,8	93,7	93,6	93,8	94,0
Kab. Nias Selatan	90,0	91,4	90,9	83,1	90,0	89,2	89,1
Kab. Humbang Hasundutan	85,0	84,9	84,9	83,0	83,3	87,7	84,8
Kab. Pakpak Bharat	58,3	58,0	65,0	56,1	64,4	59,8	60,3
Kab. Samosir	84,9	89,1	86,0	86,4	87,1	85,0	86,4
Kab. Serdang Bedagai	88,3	89,9	83,4	83,9	80,5	89,8	86,0
Kab. Batu Bara	88,9	88,7	88,1	88,9	89,1	88,1	88,6
Kab. Padang Lawas Utara	90,7	90,9	89,0	84,8	87,1	85,7	88,0
Kab. Padang Lawas	87,3	85,3	88,3	82,0	81,6	73,2	83,0
Kab. Labuhanbatu Selatan	91,3	87,1	82,2	90,1	87,6	81,4	86,6
Kab. Labuhanbatu Utara	88,9	89,4	88,0	87,3	86,7	87,1	87,9
Kab. Nias Utara	92,2	90,3	90,3	90,3	88,2	88,7	90,0
Kab. Nias Barat	88,6	87,9	84,3	86,5	85,4	86,8	86,6
Kota Sibolga	82,8	78,4	82,9	80,9	78,0	72,0	79,2
Kota Tanjung Balai	89,8	87,6	82,2	79,1	83,8	86,7	84,9
Kota Pematang Siantar	82,0	85,3	80,7	81,2	77,7	78,5	80,9
Kota Tebing Tinggi	84,7	84,0	84,2	78,3	78,3	78,4	81,3
Kota Medan	92,7	92,4	94,3	93,1	91,3	92,6	92,7
Kota Binjai	85,1	84,6	83,5	79,0	77,1	74,4	80,6
Kota Padangsidimpuan	82,3	84,4	80,8	77,6	84,1	82,3	81,9
Kota Gunungsitoli	86,5	87,6	89,4	88,8	88,2	87,4	88,0

Sumber: Olah data *Frontier 4.1*

Pada tabel 4.5 tersebut didapatkan hasil nilai rata-rata tingkat efisiensi pada kabupaten/kota selama tahun penelitian. Rata-rata nilai efisiensi secara keseluruhan didapatkan angka 0,8472 artinya nilai efisiensi kinerja fiskal di Provinsi Sumatera Utara sebesar 84,72%. Nilai tersebut belum mencapai 100%, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam penggunaan faktor produksi dirasa belum mencapai efisien dalam pengalokasian input secara optimal. Untuk mendapatkan nilai yang efisien, pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus meningkatkan lagi inputnya sebesar 15, 28% agar mendapatkan nilai output yang maksimal yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019**

Nilai rata-rata efisiensi kinerja fiskal yang didapat dari tahun 2014-2019, mengindikasikan bahwa APBD di Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang masih banyak, dikarenakan APBD yang didapat belum disalurkan dengan tepat dan terjadi pemborosan.



Sumber: DJPK,2020, diolah

**Grafik 4.4 Realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019**

Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan terutama pada penerimaan pajak daerah. Peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara berasal dari kontribusi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik terutama pada pemungutan pajak daerah maupun piutang pajak dan tambahan dari lain-lain PAD yang sah. Akan tetapi, dengan meningkatnya PAD dari tahun 2014-2019, tidak membuat provinsi Sumatera Utara menjadi mandiri, justru masih tergolong cukup rendah.

Peran PAD terhadap pembangunan sangat penting, diantaranya untuk melakukan pembiayaan daerah. Rata-rata proporsi PAD Provinsi Sumatera Utara terhadap APBD sebesar 24,1%. Hal ini menjadikan pemerintah daerah lebih mengoptimalkan lagi dalam mengurus pajak daerah, karena pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak cukup besar dibandingkan retribusi daerah dan pendapatan PAD lain yang sah.

**Tabel 4.6 Realisasi DAK Provinsi Sumatera Utara 2014-2019**

Tahun	DAK
2014	32.015.918.108.292
2015	54.805.234.709.600
2016	154.237.167.803.121
2017	161.405.061.681.898
2018	168.122.330.624.326
2019	182.046.116.034.024

Sumber: DJPK, 2020, Diolah

Pada tabel diatas (4.6) menggambarkan jumlah transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai daerahnya sesuai dengan jenis bantuan yang ditentukan. Penyaluran dana tersebut bertujuan untuk meringankan sekolah-sekolahan didaerah tersebut dalam menyediakan pendidikan terutama bagi masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah yang tidak mampu mencukupi standar kebutuhannya. Penyerapan dana (DAK) Provinsi Sumatera Utara cukup baik, hai ini bisa dilihat pada tabel diatas yang menjelaskan bahwa penyerapan dana (DAK) dari tahun 2014-2019 mengalami peningkatan. Peningkatan DAK Sumatera Utara paling besar terjadi pada tahun 2016 dari 54.805.234.709.600 menjadi 154.237.167.803.121, sehingga pada tahun 2015-2016 jumlah penduduk miskin menjadi berkurang sedikit. Secara keseluruhan Penyaluran dana (DAK) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014-2019 tidak ada pemangkasan, akan tetapi dengan peningkatan tersebut belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di provinsi tersebut.

**Tabel 4.7 Realisasi DAU Provinsi Sumatera Utara 2014-2019**

Tahun	DAU
2014	339.872.206.431.008
2015	352.831.901.190.563
2016	385.012.101.179.000
2017	398.627.991.080.375
2018	402.368.516.454.428
2019	418.292.754.848.661

Sumber: DJPK, 2020, Diolah

Pada tabel diatas (4.7) menggambarkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019 yang mengalami peningkatan. Dana (DAU) tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah guna untuk mencukupi kebutuhan daerahnya dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penyerapan dana (DAU) ini membuktikan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan daerahnya. Semakin besar dana DAU yang didapat, maka kemandirian daerah semakin berkurang, karena belum bisa mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri dan masih butuh bantuan dari luar. Jika dilihat dari tabel diatas dana (DAU) di Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan, itu menandakan bahwa selama tahun tersebut keuangan dari pemerintah daerah belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dikarenakan penduduk miskin yang masih banyak, sehingga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.



Sumber: BPS, 2020

**Grafik 4.5 Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Utara 2014-2019**

Grafik diatas menunjukkan realisasi anggaran belanja provinsi sumatera Utara tahun 2014-2019 diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dari ketiga pengalokasian tersebut realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara paling banyak untuk belanja barang dan jasa juga untuk belanja modal.

#### **F. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019**

Pada bagian ini, akan dilakukan pengujian selanjutnya yaitu melakukan pengujian regresi data panel untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (jumlah penduduk, Pendidikan, dan PDRB) terhadap variabel dependen (Efisiensi kinerja fiskal) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019. Dalam melakukan pengujian variabel tersebut dibantu dengan menggunakan

alat analisis berupa *software Evies 10* dan didapatkan hasil pengujian berikut ini:

### 1) Uji Model Terbaik

Terdapat dua uji yang akan dilakukan dalam pemilihan model terbaik, diantaranya:

#### a. Dengan Uji Chow

Pengujian *Uji Chow* ialah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui teknik atau model terbaik yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel apakah menggunakan *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)*. Hipotesis yang didapatkan ialah:

$$H_0 = \text{Common Effect Model (CEM)}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$$

Dalam pengujian *Uji Chow* pada penelitian ini didapatkan output sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

<b>Hasil Uji Chow</b>			
<b>Effect Test</b>	<b>Statistic</b>	<b>d.f</b>	<b>Prob.</b>
<i>Cross-section F</i>	20.759.422	(32,162)	0.0000
Cross-section Chi-Square	322.613.947	32	0.0000
Kesimpulan :		Prob. 0.0000 < 0,05 Tidak bisa menerima $H_0$  artinya <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> lebih baik dari pada <i>Common Effect Model (CEM)</i>	
$\alpha = 5\%$			

Sumber: Hasil olah data *Eviews 10*

Dari tabel 4.8 didapatkan hasil olah data *Uji Chow* dengan nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai alpha ( $0.0000 < 0,05$ ) artinya tidak bisa menerima  $H_0$ . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM)

b. Dengan Uji Hausman

Pengujian Uji Hausman yaitu pengujian dengan tujuan untuk memilih teknik atau model terbaik yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel apakah menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dengan Hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Model Random Effect}$$

$$H_1 = \text{Model Fixed Effect}$$

Berikut hasil estimasi dengan *Uji Hausman* (antara Model *Fixed Effect* dan Model *Random Effect*)

**Tabel 4.9**

<b>Hasil Uji Hausman</b>			
Test Summary	Statistic	Chi-Sq. Df	Prob.
Cross-section random	35.686.702	3	0.0000
Kesimpulan:	Prob. $0.0000 < 0,05$ Tidak bisa menerima $H_0$  <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> lebih baik daripada <i>Random Effect Model (REM)</i>		
$\alpha = 5\%$			

Sumber: Hasil olah data *Eviews 10*

Pada tabel diatas (4.9) menampilkan hasil dari *uji hausman* dengan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai alpha ( $0.0000 < 0,05$ ) Artinya tidak menerima  $H_0$ . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari uji tersebut model yang paling baik untuk dilakukan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dari pada *Random Effect Model* (REM).

Setelah didapatkan hasil dari uji keduanya yaitu uji chow dan uji hausman, yang menyatakan bahwa pada uji chow model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* dibandingkan dengan *Common Effect Model*. Sedangkan pada uji hausman didapatkan hasil model terbaik yaitu *Fixed Effect Model* dibandingkan dengan *Random Effect Model*. Maka tidak perlu lagi untuk menguji dengan *uji langrage multiplier* (LM).

## 2) Estimasi dengan Model *Fixed Effect*

Pada bagian ini akan dilakukan regresi data panel dengan estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) yang bertujuan untuk mengukur pengaruh dari variabel jumlah penduduk (X1), Pendidikan (X2), dan PDRB (X3) terhadap variabel Y yaitu nilai efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2019. Berikut ini hasil regresi yang didapatkan:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Estimasi Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Prob.	Kesimpulan
C	1.546.411	0.0000	Signifikan
PENDUDUK	-5.04E-07	0.0058	Signifikan
PENDIDIKAN	-0.058102	0.0000	Signifikan
PDRB	1.43E-06	0.0840	Tidak Signifikan
R-squared	0.843308		
F-statistic	2.491.077		
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data eviews 10

Pada tabel diatas (4.10) menunjukkan hasil regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model*. Dari hasil itu menjelaskan pengaruh variabel secara simultan (R-squared) juga pengaruh variabel secara parsial yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB terhadap variabel efisiensi kinerja fiskal. Sehingga didapatkan persamaan regresi berikut ini:

**Efisiensi = 1,546.411 – 0,000000504 jumlah penduduk -0,058102**

**Pendidikan + 0,00000143 PDRB**

Dari persamaan diatas angka yang diperoleh dapat diinterpretasikan berikut ini:

- a. Pada persamaan diatas didapatkan nilai konstanta (C) sebesar 1.546.411. Nilai ini menjelaskan bahwa apabila nilai dari variabel independen yaitu jumlah penduduk, pendidikan, PDRB sama dengan nol ( $X_1, X_2, X_3 = 0$ ), maka besaran variabel efisiensi fiskal yang didapatkan sebesar 1,546.411 persen.
- b. Nilai koefisien dari jumlah penduduk sebesar -0,000000504 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0058 ( $<0,05$ ), Hal ini menunjukkan bahwa

jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja fiskal. Maksudnya, apabila jumlah penduduk kabupaten/kota meningkat sebesar 1 jiwa, maka efisiensi kinerja fiskalnya menjadi menurun sebesar 0,000000504. Sehingga, bisa dikatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara menyebabkan kesejahteraan dari masyarakatnya menjadi menurun .

- c. Pada variabel pendidikan mendapatkan nilai koefisien sebesar - 0,058102 dengan perolehan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ( $<0,05$ ), ini menunjukkan bahwa pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota Sumatera Utara. Hal ini menjelaskan bahwa ketika rata-rata pendidikan di kabupaten/kota bertambah 1 tahun maka efisiensi kinerja fiskalnya menjadi menurun. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel pendidikan di Sumatera Utara tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja fiskal di Sumatera Utara akan tetapi kinerja fiskalnya menjadi menurun, hal ini dikarenakan kinerja pemerintah daerah memiliki cara dalam penanganan masalah yang berbeda-beda.
- d. Nilai koefisien pada PDRB sebesar 0,00000143 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0840 ( $>0,05$ ), artinya pada variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel efisiensi kabupaten/kota Sumatera Utara.

### 3) Pengujian Hipotesis

#### a. Uji F

Pengukuran Uji F pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara simultan atau keseluruhan dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 95% ( $\alpha = 0,05$ ).

Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Secara simultan tidak berpengaruh

$H_1$  = Secara simultan berpengaruh

**Tabel 4.11**

**Hasil Uji F**

Sum of Square	Df	Mean Square	F-Stat	Prob
0.117953	3	0.847225	2.491.077	0.000000

Sumber: Hasil olah data *Eviews 10*

Dari hasil diatas secara simultan didapatkan nilai probabilitas (*F-Stat*) sebesar 0,000000 ( $<0,05$ ) artinya tidak menerima  $H_0$ . Sehingga bisa dikatakan bahwa secara simultan dari ketiga variabel tersebut (jumlah penduduk, pendidikan, PDRB) berpengaruh terhadap variabel efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan tingkat signifikan 95%.

#### b. Nilai Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  ini digunakan untuk melihat besaran ukuran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bisa diartikan lain dengan kemampuan variabel dalam menjelaskan

variabel dependen. Yang mana nilainya dapat dilihat pada bagian R-Squarenya.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Nilai koefisien Determinan ( $R^2$ )**

R-squared	Adjusted R-squared
0.843308	0.809455

Sumber: Hasil olah data *Eviews 10*

Dari hasil pengolahan data regresi data panel, didapatkan nilai R-square pada tabel 4.12 sebesar 0,843308 (84,3%). Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 84,3% dan sisanya sebesar 15,7% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang berada diluar model.

c. Uji T

Pengujian uji T berfungsi untuk melihat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Ketika nilai signifikasinya  $< 5\%$  artinya tidak bisa menerima  $H_0$ . Sehingga menandakan bahwa secara parsial/individu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

1) Pengaruh variabel Jumlah Penduduk (X1) terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal (Y)

Dari hasil olah data pada tabel 4.10 variabel jumlah penduduk mendapat nilai koefisien regresi sekitar -0,000000504 dengan nilai

probabilitas 0,0058. Maka, variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dengan variabel efisiensi kinerja fiskal. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga didapatkan asumsi bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten/kota kesejahteraan masyarakat menjadi menurun dikarenakan kurangnya jumlah penduduk yang produktif, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Asumsi ini bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Keynesian dengan pandangannya bahwa ketika jumlah penduduk yang meningkat, maka akan diikuti juga dengan kemajuan atau peningkatan baik produktifitas atau jumlah permintaan tenaga kerja, sehingga dengan penambahan jumlah penduduk diduga dapat memacu dari pembangunan ekonomi.

Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Islami (2018) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Dipenelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap perolehan pendapatan yang diperoleh masyarakat dan juga daerah, dikarenakan pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah cukup besar. Dari peningkatan pendapatan tersebut alokasi dana

yang disalurkan dari pemerintah daerah kepada masyarakat juga semakin meningkat.

Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan anggapan dari ahli ekonomi (Robert Malthus) yang menyatakan bahwa pertumbuhan awal dari pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dalam keadaan optimum pertumbuhan ekonomi bisa menjadi menurun. Dari anggapan tersebut menjelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi bisa saja menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi menurun dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan tidak tercapainya dalam proses pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data yang didapat dari BPS tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2019 sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tahun	TPT (%)
2014	6,23
2015	6,71
2016	5,84
2017	5,60
2018	5,56
2019	5,41

Sumber: BPS, 2020

Pada Tabel 4.13 diketahui bahwa jumlah TPT di Sumatera Utara tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, Sedangkan pada tahun 2016 - 2019 mengalami penurunan. Akan tetapi dengan penurunan pengangguran yang sedikit itu belum mampu memberikan dampak yang positif terhadap efisiensi kinerja fiskal. Sehingga dari pemerintah sendiri harus menyediakan lagi lapangan pekerjaan yang lebih agar pengangguran yang ada di Provinsi Sumatera Utara bisa berkurang lebih banyak dan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada, sehingga bisa terciptanya kesejahteraan masyarakat.

2) Pengaruh variabel Pendidikan (X2) terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal (Y)

Nilai koefisien variabel pendidikan pada tabel 4.10 didapatkan angka sebesar -0,058102 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ( $< 0,05$ ), ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Sumatera Utara dan signifikan. Artinya tingkat pendidikan seseorang di Sumatera Utara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini diasumsikan karena pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara.

**Tabel 4.14**  
**Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	RLS
2014	8.93
2015	9.03
2016	9.12
2017	9.25
2018	9.34
2019	9.45

Sumber: BPS, 2020

Dari data diatas terlihat bahwa rata-rata lama sekolahnya mengalami peningkatan sebesar 0,52 dari tahun 2011-2019 yaitu dari 8,93 tahun pada tahun 2011 meningkat menjadi 9,45 pada tahun 2019. Dari rata-rata itu dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolahnya setara dengan sudah sampai tamat SLTP. Dapat dikatakan bahwa pendidikan Sumatera Utara belum memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan pendidikan. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa pendidikan di Sumatera Utara belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tingkat efisiensi kinerja fiskal pada pemerintah daerah, karena orang yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih mudah untuk memperoleh kesempatan kerja.

3) Pengaruh Variabel Produk Domestik Bruto (PDRB) (X3) terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal (Y)

Dari hasil olah data, variabel PDRB mendapatkan nilai koefisiensi sebesar 0,00000143 dengan probabilitas sebesar 0,0840. Artinya bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja fiskal di

Sumatera Utara. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hipotesis yang dibuat sebelumnya yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja fiskal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya nilai tambah barang dan jasa belum pasti mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Islami (2017) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja fiskal. Artinya ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tingkat efisiennya menjadi menurun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan PDRB belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Timur dikarenakan masih terdapat kesenjangan antara penduduk dipedesaan dengan penduduk yang ada diperkotaan.

Penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori Adolf Wagner yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan perkapita mampu meningkatkan juga pengeluaran pemerintah, dikarenakan dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah harus mampu mengatur yang ada hubungannya dengan masyarakat, baik itu mengurus pendidikan, pariwisata, maupun kebudayaan. Sebab, dengan memperbaiki pembangunan masyarakat dapat memberikan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Linda (2014) yang menyebutkan

bahwa nilai PDRB memiliki hubungan yang sama dengan pengeluaran pemerintah artinya perekonomian daerah berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setiawati (2017) yang mendapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan, hasil tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara PDRB dengan penduduk miskin. Artinya ketika PDRBnya meningkat sebesar 1% maka itu akan meningkatkan pula jumlah penduduk miskinnya, dan sebaliknya jika PDRBnya itu menurun sebesar 1 %, maka jumlah penduduk miskin juga ikut menurun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara, jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan diantara perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan pengamatan, penduduk di Sumatera Utara mayoritas pekerjaannya di sektor pertanian. Berikut pertumbuhan PDRB dari 2014-2019:

**Tabel 4.15**

**Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara 2014-2019 atas dasar harga konstan 2010**

Sektor	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,37	5,57	4,65	5,31	4,87	5,13
B Pertambangan dan Penggalian	5,16	6,1	5,68	4,81	5,46	4,53
C Industri Pengolahan	3	3,91	5,05	2,31	3,66	1,23
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,28	2,28	4,85	8,72	2,58	4,92

E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,04	6,44	5,71	6,67	2,9	5,44
F Konstruksi	6,79	5,52	5,6	6,79	5,45	7,29
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	3,91	5,22	5,87	6,11	6,93
H Transportasi dan Pergudangan	5,57	5,68	6,07	7,35	6,14	5,80
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,48	6,95	6,54	7,32	7,53	8,88
J Informasi dan Komunikasi	7,23	7,11	7,76	8,57	8,43	9,63
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	7,17	4,11	0,49	1,73	1,92
L Real Estat	6,59	5,76	5,9	7,56	5,34	4,84
M,N Jasa Perusahaan	6,76	5,86	5,95	7,46	7,1	5,81
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,92	5,83	3,02	2,52	6,12	8,11
P Jasa Pendidikan	6,37	5,03	4,9	4,93	6,29	4,86
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,72	7,21	7,37	7,64	5,9	4,63
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,04	6,69	6,5	7,56	5,96	6,25

Sumber: BPS, 2020

Dari data diatas menjelaskan bahwa Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan industri pengolahan dan jasa keuangan dan asuransi, akan tetapi lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Peningkatan nilai dari sektor tersebut dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai pada sektor tersebut (pertanian, kehutanan, dan perikanan) kinerja dari pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Sehingga dari hasil tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai laju pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

masih tergolong rendah, sehingga tidak mempengaruhi kinerja fiskal dalam mensejahterakan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

#### **G. Hasil Penelitian dalam Sudut Pandang Keislaman.**

Dalam islam manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan telah diberikan kelebihan diantara makhluk lainnya yaitu dengan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT, selain itu manusia merupakan salah satu dari faktor produksi. Menurut pandangan ekonomi islam yang dinamakan produksi yaitu kegiatan dalam penambahan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada dan dilakukan dengan cara yang baik atau sesuai syariat islam. Tujuan dari produksi adalah untuk menciptakan inovasi yang baru agar mendapatkan nilai lebih dari barang dan jasa serta dapat dimanfaatkan oleh semua yang membutuhkan. Selain itu, tujuan produksi menurut Umar bin Khattab salah satunya yaitu untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Sebab, daerah yang mampu memproduksi sendiri bisa dikatakan bahwa daerah tersebut mampu membebaskan diri dari ketergantungan ekonomi terhadap daerah lain. Dalam produksi sendiri harus memperhatikan pada sisi efisiensinya juga agar dalam penambahan jumlah output barang dan jasa yang dihasilkan bisa dilakukan secara optimal, artinya dalam memproduksi barang atau jasa bukan cuma asal-asalan menambah jumlah barang yang akan diproduksi, melainkan harus memperhatikan jumlah faktor produksi yang digunakan agar jumlah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi pemborosan.

Pengolahan sumber daya yang dimiliki secara optimal, menunjukkan sikap seseorang dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi dengan baik, sehingga bisa membentuk seseorang untuk lebih bersyukur lagi dalam menggunakan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hal itu juga terjadi didalam pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan serta pengalokasian sumber daya daerah yang dimiliki. Dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemaslahatannya terlebih dahulu agar dalam pengalokasian tersebut bisa di tersalurkan dengan baik dan memberikan eksternalitas yang positif terhadap masyarakat. Didalam ajaran islam juga sudah diajarkan terkait pengalokasian sumber daya yang baik sesuai dengan syariat islam, misalnya dalam pendistribusian kekayaan daerah, pemerintah harus menghindari dari ketidakseimbangan atau kurangnya pemerataan, sebab itu nanti akan muncul masalah yang ada di masyarakat dan menjadikan kecemburuan sosial antar masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa inti dari pembangunan yaitu pengelakosaian sumber daya yang efisien dan merata, karena untuk melakukan hal itu didukung dengan bantuan moral.

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara belum bisa dikatakan efisien, dikarenakan variabel input yang digunakan belum mampu mempengaruhi variabel output secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak yang kuat terhadap tujuan dalam pembangunan ekonomi daerah terutama dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan. Ketidakefisiensian tersebut diperkirakan disebabkan oleh

kurang tepatnya pemerintah daerah dalam pengalokasian dana sehingga terjadi pemborosan anggaran.

Pembahasan terkait kesejahteraan akan berhubungan dengan tujuan dari syariat islam. Dalam pandangan maqashid syariah seperti yang dirumuskan Imam Al-Ghazali bahwa tujuan utama dari kelima unsur pokok syariah yaitu untuk pemeliharaan dan juga pengembangan umat manusia. Dari kelima unsur tersebut, ada tiga unsur yang sudah ada dan menempel pada diri setiap manusia yaitu hifdz nafs, hifdz aql, dan hifdz nasb. Sedangkan hifdz din, dan hifdz mal merupakan unsur yang melekat pada diri setiap manusia, dengan adanya kedua unsur tersebut manusia dapat melangsungkan hidupnya. Dalam penelitian ini ada satu variabel yang mampu menjelaskan unsur pokok syariah yaitu variabel pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari pemeliharaan akal (Hifdz aql). Menurut pendapat Yusuf Al-qardhowi yang menjelaskan bahwa didalam islam untuk menjaga eksistensi akal dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mencari ilmu. Dengan ilmu manusia dapat berfikir lebih jernih dan mampu membedakan mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana hal buruk untuk tidak dikerjakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu dari indikator dari pembangunan manusia yaitu penjagaan akal. Akan tetapi dalam penelitian ini pendidikan belum mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap pembangunan ekonomi, sehingga bisa dikatakan bahwa pendidikan di provinsi tersebut belum mampu menjaga salah satu dari lima unsur pokok syariah yaitu hifdz aql.